



RENCANA KERJA

TAHUN 2023

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

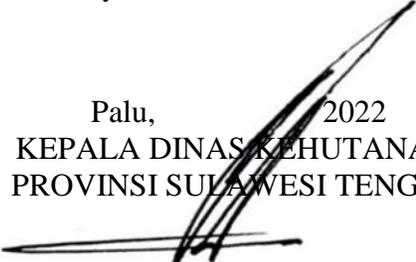
KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan tindak lanjut hasil Forum SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2020 – 2025, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan akan mencapai hasil yang baik apabila didukung oleh perencanaan yang disusun didasarkan atas data yang valid dan mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat sesuai kebijakan prioritas dinas kehutanan guna mewujudkan visi “**GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU**”. Oleh karena itu, Rencana Kerja Tahunan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta UPTD-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Semoga segala upaya yang dilakukan dalam menata pembangunan kehutanan di Sulawesi Tengah selalu mendapatkan bimbingan dan ridho ALLAH SWT, sehingga mencapai hasil yang berdaya guna dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Palu, 2022
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. H. NAHARDI, MM., IPU.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621231 198703 1 403

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyusunan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	50
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	56
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	59
3.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Kehutanan Tahun 2022	59
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	8
Tabel 2.2	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 Dinas Kehutanan	9
Tabel 2.3	Realisasi Pencapaian Target Tahun 2021	10
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Indikator Sistem Data dan Informasi SDH	10
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Indikator Persentase Sumbangan Hutan Produksi	12
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Indikator Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan dan Lahan	13
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Indikator Kasus Hukum berdasarkan Laporan Kejadian (LK)	14
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Indikator Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	15
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Indikator Tutupan Hutan dan Lahan diluar Kawasan Hutan	16
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Indikator Luas Hutan yang dikelola Masyarakat	17
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	19
Tabel 2.12	Realisasi Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (s/d Bulan Juni)	35
Tabel 2.13	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	57
Tabel 3.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah kebijakan tahunan pembangunan kehutanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2020 – 2025, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun melalui proses analisis dari hasil – hasil pembangunan dalam bidang kehutanan yang telah dicapai termasuk ketersediaan sumber pembiayaan yang dimiliki pada tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui permasalahan dan tantangan pembangunan yang dinilai dapat mengganggu serta menghambat pelaksanaan pembangunan kehutanan pada Tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, yang dijadikan sebagai pedoman adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Hal ini dimungkinkan karena dalam dokumen tersebut terdapat rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memuat prioritas dan sasaran pembangunan kehutanan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
- c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- e. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- f. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- n. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.
- p. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800/03.96/SET tanggal 6 Februari 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan kehutanan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan sebagai agenda tahunan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuannya adalah untuk menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, memuat Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Capaian Program Renstra SKPD, Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45

Tahun 2012. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah**, berisikan uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta kementerian/lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*). Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal**, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil-hasil rapat koordinasi bersama seluruh UPT KPH se-Prov. Sulteng, serta hasil pengumpulan data dan informasi langsung di lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, menguraikan tentang telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah**, berisikan uraian mengenai perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya serta tabel rencana program Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 hingga semester II serta perkiraan target Tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran melalui meliputi :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

a) Belanja Tidak Langsung

Alokasi belanja administrasi umum/rutin (input) Tahun 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 48.170.870.187,- (*Empat puluh delapan milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*).

b) Belanja Langsung

Pada tahun 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, UPTD Tahura dan UPTD KPH melaksanakan 22 (*dua puluh dua*) program yang terdiri dari 39 (*tiga puluh sembilan*) kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 38.211.454.079,- (*Tiga puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah*). Adapun realisasi fisik sebesar 100 % dan keuangan sebesar 96,54 % Rp. 36.891.100.334,- (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*)

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Realisasi program/kegiatan dikelompokkan berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kierja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Kehutanan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan secara Berkelanjutan	Jumlah data dan informasi SDH yang mendukung KPH di Suleng	1 Dok	1 Dok	100%	
		Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) terhadap penerimaan daerah meningkat setiap tahun	3%	1630,43 %	54348%	
		Persentase Penurunan Jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2%	6,3%	315%	
		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)	181 Kasus	178	100%	
		Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	70%	70%	100%	
		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	2.245 Ha	9011,1 Ha	401%	
		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	20.000 Ha	5.582,90 Ha	27,91%	
		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha perberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok	28 Kelompok	100%	

Berdasarkan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdapat dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua indikator berada dalam kategori sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Berikut realisasi pencapaian target dibandingkan pada Tahun sebelumnya, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.3 Realisasi Pencapaian Target Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Capaian Kinerja s/d 2021 (%)	Target Akhir Renstra
							Target	Realisasi	Persentase		
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan secara Berkelanjutan	Jumlah data dan informasi SDH yang mendukung KPH di Sulteng	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	5 Dok
		Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) terhadap penerimaan daerah meningkat setiap tahun	3%	856,82 %	1.300,25 %	607,05 %	3%	1630,43%	54348%	29317%	15%
		Persentase Penurunan Jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	3,6%	4,6%	5,1 %	15,5%	2%	6,3%	315%	350%	10%
		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)	228 Kasus	223 Kasus	206 Kasus	190 Kasus	181 Kasus	178 Kasus	100,00%	85%	181 Kasus
		Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	58,8%	60%	60%	65%	70%	70%	100%	100,0%	70%
		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	3.645 Ha	4.759,86 Ha	3.925,15 Ha	3.477,72 Ha	2.245 Ha	9.011,1 Ha	401%	282%	8.800 Ha
		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	30.152 Ha	24.044,82 Ha	15.862,70 Ha	43.370,61 Ha	20.000 Ha	5.582,9 Ha	27,91%	119,01%	100.000 Ha
		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha perberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	100%	91%	140 Kelompok

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Program/Kegiatan Yang Direncanakan

Program dan kegiatan Tahun 2020 yang memenuhi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan sebagai berikut:

1. Indikator : Sistem Data dan Informasi SDH yang mendukung KPH di Sulteng.

Tolok ukur terhadap pencapaian indikator kinerja ini adalah jumlah data dan informasi SDH dalam mendukung KPH di Sulawesi Tengah. Target, realisasi dan persentase pencapaian terhadap akhir masa periode renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Indikator Sistem Data dan Informasi SDH

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Sistem data dan Informasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH di Sulteng	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	5 Dok	100 %

Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang mendukung KPH di Sulawesi Tengah telah terealisasi dalam 1 Dokumen, Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan indikator kegiatannya yaitu Dokumen Promosi Investasi KPH, Sistem Informasi KPH, Dokumen Potensi Sumber Daya Hutan, Data Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kehutanan.

Pada Tahun 2021 target pencapaian terhadap indikator sasaran adalah sebanyak 1 Dok yang artinya telah mencapai target renstra tahun 2016-2021. Indikator Kegiatan meliputi Dokumen Promosi Investasi KPH terealisasi 1 Dokumen pada Triwulan IV, Sistem Informasi KPH terealisasi 4 Dokumen karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat tercaai maksimal. Dokumen Potensi Sumber Daya Hutan terealisasi 1 Dokumen pada Triwulan IV, Data Penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan di luar Kehutanan yaitu terealisasi 10 lokasi.

2. Indikator : Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) terhadap Penerimaan Daerah meningkat setiap tahun.

Tolok ukur pencapaian terhadap Indikator Kinerja Sumbangan Hutan Produksi pada Penerimaan Daerah meningkat sebesar 3 % setiap tahun yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Buka Kayu (HHBK), yaitu :

- Jumlah Unit IUPHHK yang mendapat pengesahan RKT kegiatan pemanfaatan hutan produksi
- Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku (RPBBI) Online
- Jumlah Unit yang melaksanakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Iuran Kehutanan (SIPNBP) dalam rangka Pemanfaatan Hasil Hutan secara tertib.

Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap persentase sumbangan hutan produksi pada penerimaan daerah terhadap akhir masa periode renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Indikator Persentase Sumbangan Hutan Produksi

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Sumbangan Hutan Produksi pada Penerimaan Daerah	607.05 %	3 %	1630.43 %	54348 %	15 %	29317 %

Indikator Sumbangan Hutan Produksi pada Penerimaan Daerah, menetapkan target 3% pada Tahun 2021, target ini didasarkan pada hasil evaluasi Tahun 2016 yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang berperan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumberdaya hutan, sedangkan sejak Tahun 2018 Target Penerimaan Pendapatan Daerah semakin bertambah, berikut beberapa penjelasan terkait bertambahnya realisasi penerimaan pendapatan daerah yaitu dikarenakan realisasi PSDH sebagian besar diperoleh dari penyeteroran Kurang Bayar DBH Tahun 2019 dan Tahun 2020 (TW1, TW2, TW3 & TW4) yang dialokasikan pada TA.2021, Sedangkan untuk IIUPH melebihi target dimana realisasi setiap TW stabil di atas target dan terdapat juga penyeteroran Kurang Bayar DBH Tahun 2020 yang dialokasikan pada TA.2021 dan untuk DR realisasi sebagian besar diperoleh dari penyeteroran Kurang Bayar DBH Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang di alokasikan pada TA.2021.

Pada Tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden No.113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA.2021 yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), mempengaruhi realisasi yang sangat tinggi sebesar 1630,43% atau setara dengan Nilai Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (PSDH, DR dan IIUPH) Rp.12.156.020.170,-. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian terhadap indikator ini pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan berdasarkan Nilai Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (PSDH, DR dan IIUPH).

3. Indikator : Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021.

Tolok ukur pencapaian Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan adalah Jumlah Lokasi titik hotspot yang ditangani. Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan terhadap akhir masa periode renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Indikator Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan dan Lahan

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan	15,5 %	2 %	6,3 %	315 %	10 %	350 %

Pencapaian terhadap indikator sasaran ini dilakukan melalui kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Target kinerja pada kegiatan ini yaitu sebesar 2% (7 titik hotspot), dan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 6,3% dengan 18 titik hotspot. Kegiatan Pemantauan Lokasi Rawan Kebakaran yang ditangani tersebar di wilayah UPT KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian indikator kinerja ini melebihi target Renstra tahun 2016-2021 yaitu 6,3% (18 titik) dari target 2% (7 titik). Pencapaian ini sangat signifikan karena penanganan titik hotspot melebihi target pada Tahun 2021. Kegiatan yang mendukung dalam Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 hotspot menjadi 285 hotspot pada Tahun 2021 yaitu pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan dan lembaga masyarakat desa pada 14 Kabupaten/Kota yang bertujuan agar persentase penurunan jumlah hotspot tiap tahunnya dapat menurun sebanyak 2 % dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Indikator : Persentase Kasus Hukum yang berkenaan dengan Kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan Laporan Kejadian (LK).

Tolok ukur pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kasus Hukum adalah kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap Persentase Kasus Hukum terhadap akhir masa periode renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Indikator Kasus Hukum berdasarkan Laporan Kejadian (LK)

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Kasus Hukum yang berkenaan dengan Kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)	190 Kasus	181 Kasus	178 Kasus	100 %	181 kasus	85 %

Data capaian pada tahun awal perencanaan yaitu sebanyak 241 kasus dan ditargetkan Pada Tahun 2021 kasus hukum berdasarkan Laporan Kejadian (LK) yaitu 181 kasus, diharapkan target dapat menurun sebanyak 5 % atau sebanyak 12 kasus setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 dari target tahunan 12 kasus terealisasi sebanyak 12 kasus yang di tangani atau sama dengan 178 kasus, Capaian Kinerja Persentase Kasus Hukum yang berkenaan dengan Kehutanan dengan realisasi nyata sebesar 100%, yaitu hasil dari perbandingan realisasi dan target tahunan, sedangkan target sampai dengan Tahun 2021 terhadap Tahun 2021 yaitu 85 %.

Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Hutan dilaksanakan sejak bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2021 oleh Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Kegiatan Patroli dan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan di wilayah UPT KPH se-Sulawesi Tengah, diperoleh hasil sebanyak 12 (dua belas) kasus yang ditemukan oleh Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Prov.Sulteng, dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat seperti Berkurangnya gangguan keamanan hutan, Penurunan konflik perambahan kawasan hutan serta Optimalnya pengawasan dan pengendalian kegiatan peredaran hasil hutan illegal di Sulawesi Tengah, sehingga Pengawasan dan pengendalian gangguan keamanan hutan berjalan efektif. Dengan melakukan pembinaan, memberikan arahan/ sosialisasi serta melakukan mediasi konflik jika terdapat permasalahan.

Pencapaian terhadap indikator ini didukung oleh Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

5. Indikator : Nilai Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi Meningkat Setiap Tahun.

Tolok ukur pencapaian terhadap indikator Nilai Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi meningkat setiap tahun adalah :

- Jumlah dokumen Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang dibina
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di daerah penyangga KSA/KPA

Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap dokumen perencanaan yang tersusun terhadap akhir masa periode renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Dokumen Perencanaan yang tersusun

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	%		
Nilai Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi meningkat setiap tahun	65 %	70 %	70 %	100 %	70 %	100 %

Pengelolaan Kawasan Konservasi pada KPA TAHURA Sulteng dengan luas kawasan 7.128 ha terletak di Kecamatan Mantikulore dengan melintasi dua wilayah Kabupaten/kota yaitu kota palu dan Kab.Sigi. Sesuai dengan Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sub Urusan Konservasi SDA dan Ekosistemnya terkait Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA yang pelaksanaannya merupakan kewenangan Daerah Provinsi. Kondisi Pengelolaan TAHURA Sulteng saat ini, berdasarkan perhitungan dari indeks pada Tahun 2021 penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi mencapai 70%.

Dokumen Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah sangat diperlukan guna mendukung pengelolaan kawasan di wilayah TAHURA Sulteng, dokumen ini memuat pedoman dan acuan utama dalam penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi TAHURA Sulawesi Tengah. Adapun Metode yang digunakan dalam mengukur Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yaitu Metode METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*).

6. Indikator : Luas Tutupan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Lahan diluar Kawasan Hutan Meningkatkan Setiap Tahun..

Tolok ukur pencapaian indikator ini, adalah pembuatan tanaman RHL di Wilayah UPT KPH. Target, Realisasi dan persen pencapaian terhadap luas areal pembuatan tanaman RHL pada akhir masa periode renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Indikator Tutupan Hutan dan Lahan diluar Kawasan Hutan Rakyat

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Luas Tutupan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Lahan diluar Kawasan Hutan Meningkatkan setiap tahun	3.477.72 Ha	2.245 Ha	9.011,1 Ha	401 %	8.800 Ha	282 %

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga tetap terjaganya daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Pada Tahun 2021 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ditargetkan seluas 2.245 Ha dengan realisasi kinerja dapat melebihi target yaitu seluas 9.011,1 Ha, persentase sebesar 401% dan capaian hingga tahun terakhir Renstra yaitu mencapai 282%. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencakup seluruh kegiatan Pembuatan Tanaman RHL, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, maupun Penghijauan Lingkungan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi bersama UPT TAHURA/KPH se Sulteng.

Kegiatan pembuatan tanaman hutan maupun penghijauan lingkungan di berbagai wilayah penyangga UPT KPH yang berada di Kabupaten/Kota se Sulteng dengan jenis tanaman produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi baik kayu maupun turunannya.

Pencapaian terhadap indikator sasaran ini didukung oleh program Pengelolaan Hutan dengan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan, Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara; Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kegiatan

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

7. Indikator : Luas Hutan yang dikelola Masyarakat Meningkat Setiap Tahun.

Tolok ukur pencapaian indikator Luas Hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun adalah :

- Luas hak kelola masyarakat melalui pemberian ijin HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan seluas 100.000 Ha
- Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan

Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap persentase Luas Hutan yang dikelola Masyarakat terhadap Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11. Target dan Realisasi Indikator Luas Hutan yang dikelola Masyarakat

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap Capaian 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Luas Hutan yang dikelola Masyarakat meningkat setiap tahun	43.370,61 Ha	20.000 Ha	5.582,90 Ha	27,91%	100.000 Ha	119,01%

Indikator Luas Hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun, mencakup Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial. Capaian Kinerja pada Tahun 2021 tidak mencapai target tahunan yaitu seluas 5.582,90 Ha, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meningkat sangat signifikan. Apabila ditambahkan dengan capaian kinerja Tahun 2021, maka total keseluruhan seluas 119.013,03 Hektar, melebihi target lima tahunan Renstra. Pada Tahun 2021 ini tidak mencapai target tahunan dikarenakan Dinas Kehutanan dan KPH lebih memprioritaskan persentase anggaran untuk memfasilitasi kegiatan pasca izin agar persetujuan perhutanan sosial dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Bimbingan Pemenuhan Hak, Kewajiban dan Ketaatan terhadap Larangan dan Sanksi, Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Persetujuan Pengelolaan PS, Penguatan Kelembagaan, Pemberian bantuan bibit dan alat-alat produktif serta pemantauan pasca pemberian bantuan.

Fasilitasi usulan persetujuan perhutanan sosial sering terkendala tahap pra kondisi masyarakat dan kesesuaian lokasi yang diusulkan. Sering ditemukan masyarakat yang mengusulkan masih beranggapan bahwa perhutanan sosial merupakan program bagi-bagi lahan yang nantinya menjadi hak milik masyarakat, sementara perhutanan sosial merupakan solusi atas keterlanjuran pengolahan kawasan hutan oleh masyarakat dan merupakan legalitas dalam mengolah hasil hutan kayu dan bukan kayu berdasarkan kesesuaian fungsi kawasan hutan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek lokasi juga beberapa kali ditemukan kendala adanya ketidaksesuaian antara lokasi lahan garapan masyarakat dengan peta lokasi yang diusulkan. Kedua permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya kapasitas dan pemahaman tenaga lapangan mengenai peraturan terkait, kurang proaktif, kurang komunikasi dan koordinasi serta lemahnya pengawasan atasan langsung.

Terhadap beberapa kendala tersebut Dinas Kehutanan melakukan intervensi untuk memastikan kesesuaian lokasi melalui kegiatan supervisi dan pengecekan lapangan dengan melibatkan personil KPH dan anggota masyarakat selaku penggarap serta melaksanakan sosialisasi dan diskusi terpusat (FGD) bersama KPH dan masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan mengenai Program Perhutanan Sosial sekaligus menganalisa kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan salah satu skema yang tepat (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan untuk penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat tidak dilaksanakan dalam DPA serta adanya rasionalisasi anggaran terkait pandemi covid maka diprioritaskan untuk mendukung target kinerja yaitu kegiatan pendataan wilayah Masyarakat Hutan Adat (MHA).

Pencapaian terhadap indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.

8. Indikator : Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pemberdayaan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya.

Tolok ukur pencapaian indikator meningkatnya Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pemberdayaan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya adalah :

- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya
- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan

Capaian realisasi kinerja untuk tahun 2021 terhadap jumlah masyarakat yang diberdayakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya.

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 Terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	%		
Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	100 %	140 Kelompok	91 %

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, terdapat dua Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan dan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan. Terdapat 28 KTH yang telah terbentuk pada 14 UPT TAHURA & KPH Lingkup Dinas Kehutanan Prov.Sulteng dan masing-masing wilayah terdapat 2 Kelompok, sedangkan pada indikator kegiatan Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan yaitu peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan, terealisasi sebanyak 100 orang dalam kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan di Tahun 2021 secara virtual akibat pandemi covid-19. Secara kuantitas, jumlah peserta melebihi target yang ditetapkan (seluruh penyuluh mengikuti kegiatan bimtek) Sedangkan secara kualitas, skema kegiatan ini memiliki kekurangan yaitu tidak adanya praktek atau simulasi secara tatap muka yang dilaksanakan bersama peserta. Kegiatan magang, pelatihan, sekolah lapang dan lainnya, sangat dibutuhkan dalam peningkatan kapasitas pendamping yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.4 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, target capaian program yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 secara umum telah tercapai. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020.

Tabel 2.11 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2020	2020	2020			2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
	DINAS KEHUTANAN DAN UPTD										
	DINAS KEHUTANAN										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
	Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Komponen instalasi listrik	1 Paket	0	1	0	0	1	0	0	0
		-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah/Negeri	Terselenggaranya rapat-rapat kerja/ koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah/negeri	1 Tahun	0	1	0	0	1	0	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	40	80	40	0,5	80	40	120	30
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	- Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	0	1	0	0	1	0	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	- Meningkatnya SDM Aparatur	100 %	80	100	80	0,8	100	80	240	60

		Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	-Pembinaan Polhut	168 Orang	43	168	43	0,25595	168	43	129	32,25
			-Pembinaan Penyuluh Kehutanan	85 Orang	15	85	15	0,17647	85	15	45	11,25
			-Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi	1 Paket	0	1	0	0	1	0	0	0
			-Laporan pengelolaan kepegawaian	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	- Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset	-Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan	1 Dok	2	1	2	2	1	2	6	1,5
			-Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan	1 Dok	2	1	2	2	1	2	6	1,5
			-Laporan rekonsiliasi penerimaan	1 Dok	4	1	4	4	1	4	12	3
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	- Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan	9 Dok	9	9	9	1	9	9	27	6,75
		Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kehutanan	-RKA, DPA, DPPA, RKA-KL, Renja	9 Dok	9	9	9	1	9	9	27	6,75
			-LAKIP, LPPD, LKPJ, Statistik								0	0
			-Terselesaikannya LHP Baru								0	0
			-Terselesaikannya LHP Lama								0	0
		Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sul-Teng	-Koordinasi pembangunan kehutanan	14 Kali	14	14	14	1	14	14	42	10,5
			-Data & informasi promosi Dishut	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pameran promosi kehutanan dan daerah	1 Kali	0	1	0	0	1	0	0	0
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	2,08	3	2,08	0,69333	3	2,08	6,24	1,56
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Jumlah Unit IUPHHK yang mendapat pengesahan RKT kegiatan pemanfaatan hutan produksi	2 Unit	4	2	4	2	2	4	12	3
			- Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku (RPBB) Online	20 Unit	62	20	62	3,1	20	62	186	46,5
			Jumlah Unit yang melaksanakan sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan luran Kehutanan (SIPNBP) dalam rangka Pemanfaatan Hasil Hutan secara tertib	400 Unit	1411	400	1411	3,5275	400	1411	4233	1058,25
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Dokumen Promosi Investasi KPH	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			Sistem Informasi KPH	13 Dok	4	13	4	0,30769	13	4	12	3
			Dokumen Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			Data Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Di luar Kehutanan	10 Lokasi	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	15,5	2	15,5	7,75	2	15,5	46,5	11,625
		Pengendalian Karhutla	Jumlah Lokasi titik hotspot yang ditangani	14 Lokasi	45	14	45	3,21429	14	45	135	33,75
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)	192 Kasus	190	192	190	0,98958	192	190	570	142,5
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi pencegahan dan perusakan SDH daerah rawan	14 Lokasi	16	14	16	1,14286	14	16	48	12
			Jumlah pengaduan dan lokasi yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan per-UU-an kehutanan	14 Lokasi	21	14	21	1,5	14	21	63	15,75
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun.	65 %	65	65	65	1	65	65	195	48,75
		Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Jumlah Dokumen Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	0 Dok	1	0	1	#DIV/0!	0	1	3	0,75
			Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang dibina	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di daerah penyangga KSA/KPA	12 Desa	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	1.975 Hektar	3.477,72	1.975	3.477,72	1,76087	1.975	3.477,72	10433,16	2608,29
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah RPRHL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan)	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah RTnRHL (Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan)	13 Dok	13	13	13	1	13	13	39	9,75
			- Binwasdal kegiatan Rehabilitasi Lahan	13 KPH	13	13	13	1	13	13	39	9,75
		Pembinaan Pengelolaan DAS	- Jumlah Forum DAS Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			- Binwasdal pengelolaan DAS di KPH	13 Unit	13	13	13	1	13	13	39	9,75
		Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Jumlah sumber benih berkualitas yang dibangun	1 Unit	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Binwasdal perbenihan tanaman hutan di KPH	13 Unit	13	13	13	1	13	13	39	9,75
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	50.000 Bibit	50.000	50.000	50.000	1	50.000	50.000	150000	37500

	PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	20.000 Hektar	43.370,61	20.000	43.370,61	2,16853	20.000	43.370,61	130111,83	32527,9575
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas hak kelola masyarakat melalui pemberian jnin HKm, HD, HTR, pengembangan HR dan Kemitraan seluas 100.000 Ha	20.000 Hektar	43.370,61	20.000	43.370,61	2,16853	20.000	43.370,61	130111,83	32527,9575
	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	- Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan	13 Lokasi	24	13	24	1,84615	13	24	72	18
		- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	13 Lokasi	8	13	8	0,61538	13	8	24	6
	PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok	28	28	28	1	28	28	84	21
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	28 Kelompok	28	28	28	1	28	28	84	21
		- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	14 Orang	14	14	14	1	14	14	42	10,5
	UPTD TAMAN HUTAN RAYA									0	0
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
	Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	100 %	98	100	98	0,98	100	98	294	73,5
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun.	65 %	60	65	60	0,92308	65	60	180	45
	Pengelolaan Kawasan Konservasi	- Jumlah dokumen penataan blok; dokumen perencanaan, pengelolaan; desain tapak Taman Hutan Raya yang tersusun	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		- Jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan Taman Hutan Raya	11.000 Orang	6.194	11.000	6.194	0,56309	11.000	6.194	18582	4645,5
		- Jumlah sarana dan prasarana wisata alam di Taman Hutan Raya bertambah	2 Unit	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		- Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan gangguan dan ancaman bidang kehutanan	8 Desa	8	8	8	1	8	8	24	6
		- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat	8 Desa	8	8	8	1	8	8	24	6
	Konservasi Spesies dan Genetik	- Jumlah unit kebun koleksi tumbuhan dan penangkaran satwa	3 Unit	2	3	2	0,66667	3	2	6	1,5
		- Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran tumbuhan dilindungi (Cendana dan Gowasa)	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO									0	0
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
	Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75

		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIIPHHK	1 Unit	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	40 Unit	40	40	40	1	40	40	120	30
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	40 Unit	40	40	40	1	40	40	120	30
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJPD	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	100	100	100	1	100	100	300	75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Pengendalian Karhutla	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	185 Hektar	284	185	284	1,53514	185	284	852	213
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	185 Hektar	185	185	185	1	185	185	555	138,75
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	2.000,00	2.000	2.000,00	1	2.000	2.000,00	6000	1500
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	2.000,00	2.000	2.000,00	1	2.000	2.000,00	6000	1500
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	5 Lokasi	5	5	5	1	5	5	15	3,75
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Kelompok	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	3 Kelompok	3	3	3	1	3	3	9	2,25
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	1 Orang	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIIPHHK	3 Unit	3	3	3	1	3	3	9	2,25
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	28 Unit	28	28	28	1	28	28	84	21
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	28 Unit	28	28	28	1	28	28	84	21

		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	2 Dok 100 Hektar	2 100	2 100	2 100	1 1	2 100	2 100	6 300	1,5 75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Pengendalian Karhutla	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	15 Orang	15	15	15	1	15	15	45	11,25
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	200 Hektar	150	200	150	0,75	200	150	450	112,5
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 200 Hektar 20.000 Bibit	1 150 20.000	1 200 20.000	1 150 20.000	1 0,75 1	1 200 20.000	1 150 20.000	3 450 60000	0,75 112,5 15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	1.000,00	2.000	1.000,00	0,5	2.000	1.000,00	3000	750
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	1.000,00	2.000	1.000,00	0,5	2.000	1.000,00	3000	750
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	4 Lokasi	4	4	4	1	4	4	12	3
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH TOILI BATURUBE									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	0	3	0	0	3	0	0	0
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIIPH-K	2 Unit	0	2	0	0	2	0	0	0
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK.	4 Unit	0	4	0	0	4	0	0	0
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	4 Unit	0	4	0	0	4	0	0	0
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	1 Dok 100 Hektar	1 100	1 100	1 100	1 1	1 100	1 100	3 300	0,75 75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5

		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		PROGRAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	10	12	10	0,83333	12	10	30	7,5
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	200 Hektar	229	200	229	1,145	200	229	687	171,75
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah	- Jumlah Dokumen Rancangan Teknik	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	200 Hektar	229	200	229	1,145	200	229	687	171,75
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	2.343,62	2.000	2.343,62	1,17181	2.000	2.343,62	7030,86	1757,715
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	2.343,62	2.000	2.343,62	1,17181	2.000	2.343,62	7030,86	1757,715
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	4 Lokasi	4	4	4	1	4	4	12	3
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	8	2	8	4	2	8	24	6
		UPTD KPH BANAWA-LALUNDU									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIPHHK	4 Unit	4	4	4	1	4	4	12	3
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	20 Unit	20	20	20	1	20	20	60	15
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	20 Unit	20	20	20	1	20	20	60	15
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	60 Hektar	60	60	60	1	60	60	180	45
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	30	50	30	0,6	50	30	90	22,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	0	10	0	0	10	0	0	0
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		PROGRAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	11	12	11	0,91667	12	11	33	8,25

		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	50 Hektar	182	50	182	3,64	50	182	546	136,5
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
				50 Ha	182	50	182	3,64	50	182	546	136,5
				40.000 Bibit	40.000	40.000	40.000	1	40.000	40.000	120000	30000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	250,00	2.000	250,00	0,125	2.000	250,00	750	187,5
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	250 Hektar	250,00	250	250,00	1	250	250,00	750	187,5
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	5 Lokasi	5	5	5	1	5	5	15	3,75
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	0	1	0	0	1	0	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH KULAWI									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	0 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	88 Unit	88	88	88	1	88	88	264	66
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	88 Unit	88	88	88	1	88	88	264	66
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	50	100	50	0,5	100	50	150	37,5
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	42	50	42	0,84	50	42	126	31,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	8 Orang	8	8	8	1	8	8	24	6
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	140 Hektar	150	140	150	1,07143	140	150	450	112,5
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok	4	1	4	4	1	4	12	3
				140 Ha	100	140	100	0,71429	140	100	300	75
				20.000 Bibit	150	20.000	150	0,0075	20.000	150	450	112,5
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	1.000	2.000	1.000	0,5	2.000	1.000	3000	750
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	1.000	2.000	1.000	0,5	2.000	1.000	3000	750
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75

		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH SINTUWU MAROSO									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	0	3	0	0	3	0	0	0
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	1 Unit	0	1	0	0	1	0	0	0
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHHK	52 Unit	0	52	0	0	52	0	0	0
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	52 Unit	0	52	0	0	52	0	0	0
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	100	100	100	1	100	100	300	75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	0	10	0	0	10	0	0	0
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	12 Orang	15	12	15	1,25	2021	15	45	11,25
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	175 Hektar	265	175	265	1,51429	175	265	795	198,75
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konsensasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	2	1	2	2	1	2	6	1,5
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	175 Ha	265	175	265	1,51429	175	265	795	198,75
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	1.900,00	2.000	1.900,00	0,95	2.000	1.900,00	5700	1425
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	1.900,00	2.000	1.900,00	0,95	2.000	1.900,00	5700	1425
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	4 Lokasi	4	4	4	1	4	4	12	3
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	0	1	0	0	1	0	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5

		UPTD KPH SIVIA PATUJU									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	60 %	40	60	40	0,66667	60	40	120	30
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	60 %	40	60	40	0,66667	60	40	120	30
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	60 %	40	60	40	0,66667	60	40	120	30
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIIPHHK	1 Unit	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	90 Unit	90	90	90	1	90	90	270	67,5
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	90 Unit	90	90	90	1	90	90	270	67,5
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	100	100	100	1	100	100	300	75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	100	50	100	2	50	100	300	75
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	0	10	0	0	10	0	0	0
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	7 Orang	7	7	7	1	7	7	21	5,25
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Hektar	280	150	280	1,86667	150	280	840	210
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	4	1	4	4	1	4	12	3
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	150 Ha	280	150	280	1,86667	150	280	840	210
			-Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	1.750 Hektar	1.750,00	1.750	1.750,00	1	1.750	1.750,00	5250	1312,5
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	1.750 Hektar	1.750,00	1.750	1.750,00	1	1.750	1.750,00	5250	1312,5
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	4 Lokasi	0	4	0	0	4	0	0	0
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	0	1	0	0	1	0	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	4	2	4	2	2	4	12	3
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	4	2	4	2	2	4	12	3
			-Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH BALANTAK									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	60 %	40	60	40	0,66667	60	40	120	30
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	60 %	40	60	40	0,66667	60	40	120	30
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75

		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	60 %	40	60	40	0,66667	60	40	120	30
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkatkan setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi kelengkapan persyaratan URKT IUPHHK-HA/HT	1 Unit	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUPHHK	4 Unit	4	4	4	1	4	4	12	3
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	6 Unit	6	6	6	1	6	6	18	4,5
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	6 Unit	6	6	6	1	6	6	18	4,5
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	0	100	0	0	100	0	0	0
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		PROGRAM PENEBAHAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	200 Hektar	192	200	192	0,96	200	192	576	144
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rancangan Teknik RHL	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	200 Hektar	192	200	192	0,96	200	192	576	144
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	2.000	2.000	2.000	1	2.000	2.000	6000	1500
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	2.000	2.000	2.000	1	2.000	2.000	6000	1500
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	4 Lokasi	4	4	4	1	4	4	12	3
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	0	1	0	0	1	0	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH PULAU PELING									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75

		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	2 Unit	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	2 Unit	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJPd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	25	100	25	0,25	100	25	75	18,75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	0	50	0	0	50	0	0	0
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	15	5	15	3	5	15	45	11,25
		PROGRAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	10 Kali	11	10	11	1,1	10	11	33	8,25
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	100 Hektar	170	100	170	1,7	100	170	510	127,5
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rancangan Teknik RHL	1 Dok	0	1	0	0	1	0	0	0
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	100 Hektar	170	100	170	1,7	100	170	510	127,5
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	250 Hektar	2.000,00	250	2.000,00	8	250	2.000,00	6000	1500
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	2.000,00	2.000	2.000,00	1	2.000	2.000,00	6000	1500
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	3	2	3	1,5	2	3	9	2,25
		UPTD KPH TEPEASA MAROSO									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	6 Unit	6	6	6	1	6	6	18	4,5
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	6 Unit	6	6	6	1	6	6	18	4,5

		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	- Dokumen RPHJPd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	0	100	0	0	100	0	0	0
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	8 Orang	8	8	8	1	8	8	24	6
		PROGRAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	100 Hektar	125	100	125	1,25	100	125	375	93,75
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	100 Ha	125	100	125	1,25	100	125	375	93,75
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	500 Hektar	500	500	500	1	500	500	1500	375
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	500 Hektar	500	500	500	1	500	500	1500	375
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Kelompok	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	3 Kelompok	3	3	3	1	3	3	9	2,25
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH TEPO ASA AROA									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Administrasi Perkantoran	-Adminstrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Atas Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHKK	1 Unit	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHHK	20 Unit	20	20	20	1	20	20	60	15
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	20 Unit	20	20	20	1	20	20	60	15

		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	100	100	100	1	100	100	300	75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	6 Orang	6	6	6	1	6	6	18	4,5
		PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Hektar	250	150	250	1,66667	150	250	750	187,5
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	2	1	2	2	1	2	6	1,5
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	150 Ha	250	150	250	1,66667	150	250	750	187,5
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	21.000	20.000	21.000	1,05	20.000	21.000	63000	15750
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	500 Hektar	300,00	500	300,00	0,6	500	300,00	900	225
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	500 Hektar	300,00	500	300,00	0,6	500	300,00	900	225
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok	4	28	4	0,14286	28	4	12	3
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	4	2	4	2	2	4	12	3
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	3	2	3	1,5	2	3	9	2,25
		UPTD KPH GUNUNG DAKO									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Alat Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi kelengkapan persyaratan URKT IUPHHK-HA/HT	1 Unit	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	3 Unit	3	3	3	1	3	3	9	2,25
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	32 Unit	24	32	24	0,75	32	24	72	18
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	32 Unit	24	32	24	0,75	32	24	72	18
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	100	100	100	1	100	100	300	75
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	0	50	0	0	50	0	0	0
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5

		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	10 Orang	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9
		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Hektar	39	150	39	0,26	150	39	117	29,25
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	2	1	2	2	1	2	6	1,5
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	150 Ha	39	150	39	0,26	150	39	117	29,25
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Hektar	1.000,00	2.000	1.000,00	0,5	2.000	1.000,00	3000	750
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	2.000 Hektar	1.000,00	2.000	1.000,00	0,5	2.000	1.000,00	3000	750
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok	2	28	2	0,07143	28	2	6	1,5
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5
		UPTD KPH POGOGUL									0	0
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
			- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Penyediaan Jasa	-Administrasi persuratan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Administrasi Perkantoran	-Atas Tulis kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Cetak dan penggandaan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Komponen instalasi listrik	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	80 %	60	80	60	0,75	80	60	180	45
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100	100	100	1	100	100	300	75
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3 %	3	3	3	1	3	3	9	2,25
		Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	12 Unit	12	12	12	1	12	12	36	9
			- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	12 Unit	12	12	12	1	12	12	36	9
		PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
		Inventarisasi dan Pemantauan	- Dokumen RPHJpd	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH	100 Hektar	0	100	0	0	100	0	0	0
			- Penataan Batas Blok/Petak	50 Km	50	50	50	1	50	50	150	37,5
			- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar	10	10	10	1	10	10	30	7,5
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2 %	2,0	2	2,0	1	2	2,0	6	1,5
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		PROGRAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5 %	5	5	5	1	5	5	15	3,75
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	12	12	12	1	12	12	36	9

		PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	175 Hektar	105	175	105	0,6	175	105	315	78,75
		Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	- Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	1	1	1	1	1	1	3	0,75
			- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS	175 Ha	105	175	105	0,6	175	105	315	78,75
			- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	20.000	20.000	20.000	1	20.000	20.000	60000	15000
		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	1.000 Hektar	1.000	1.000	1.000	1	1.000	1.000	3000	750
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan	1.000 Hektar	1.000	1.000	1.000	1	1.000	1.000	3000	750
			- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan	2 Lokasi	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	1 Lokasi	0	1	0	0	1	0	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok	28	28	28	1	28	28	84	21
		Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya	2 Kelompok	2	2	2	1	2	2	6	1,5
			- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.	2 Orang	2	2	2	1	2	2	6	1,5

2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor- faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya Target Kinerja Program/ Kegiatan

Beberapa kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja Program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1). Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun mendatang disusun setelah melalui beberapa kali pembahasan oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap program/kegiatan.
- 2). Rencana program/kegiatan dititikberatkan pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

2.1.6 Perkiraan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022, Dinas dan UPTD Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 47.142.698.019,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.314.681.998,-. Adapun realisasi dengan fisik dan keuangan program/kegiatan sampai dengan **Triwulan II** adalah:

a. Kegiatan Belanja Tidak Langsung

Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.591.613.500,- (*Dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi fisik sebesar 43,68 % Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut :

Input (Masukan)

- Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp. 20.591.613.500,-

Output (Keluaran)

- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar 43,68 %

b. Realisasi Anggaran hingga Bulan Juni 2022

Realisasi anggaran untuk belanja langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta UPTD Tahura dan 13 UPT KPH lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, secara rinci disajikan pada Tabel 12 berikut:

Tabel 2.12 Realisasi Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (s/d Bulan Juni)

NO	DINAS/BADAN/BIRO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			PERMASALAHAN	KETERANGAN
						KEUANGAN	(%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH				72.457.380.018	30.696.700.417	42,37	42,74		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			56.766.844.822	24.381.732.637	42,95	43,30		
		A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			373.084.625	14.800.000	3,97	3,97	-	TPP. Honorarium PPTK dan Non ASN Hanya dapat di SPJkan pada bulan berikutnya
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.349.750	-	0,00	0,00		
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.600.000	-	0,00	0,00		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.225.000	-	0,00	0,00		
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	Prov.Sulteng	9.225.000	9.225.000	100,00	100,00		
		5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			9.225.000	-	0,00	0,00		
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			192.302.500	675.000	0,35	0,35		
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			143.157.375	4.900.000	3,42	3,42		
		B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47.318.428.019	20.668.963.500	43,68	43,68	-	Belanja Pengadaan Printer tidak dapat dilaksanakan karena harga di aplikasi SIPD tidak sesuai dengan harga pasaran, sehingga menunggu perubahan anggaran untuk penyesuaian harga.
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Prov.Sulteng	47.142.698.019	20.591.613.500	43,68	43,68		
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			175.730.000	77.350.000	44,02	44,02		
		C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			176.939.000	46.030.000	26,01	26,01		
		1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	Prov.Sulteng	176.939.000	46.030.000	26,01	26,01		
		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200.000.000	110.027.426	55,01	55,43		
		1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DAU	Prov.Sulteng	100.000.000	73.319.101	73,32	74,09		
		2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			100.000.000	36.708.325	36,71	36,77		
		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.159.464.126	608.374.231	52,47	57,46		
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Prov.Sulteng, Jakarta/Provinsi Lainnya	39.235.200	9.109.300	23,22	23,54		
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor			397.598.727	330.967.218	83,24	83,65		
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			272.612.149	128.502.510	47,14	53,17		
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450.018.050	139.795.203	31,06	39,88		

	E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			461.485.813	204.318.455	44,27	44,36		
	1 Pengadaan Mebel	DAU	Kota Palu	51.732.813	31.424.655	60,74	61,34		
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			177.951.000	149.993.800	84,29	84,29		
	3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			231.802.000	22.900.000	9,88	9,92		
	F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.930.349.303	1.950.975.359	39,57	40,99		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Prov.Sulteng	799.228.971	445.928.347	55,79	58,95		
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.131.120.332	1.505.047.012	36,43	37,52		
	G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.147.093.936	778.243.666	36,25	39,39		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	DAU	Prov.Sulteng	134.000.000	-	0,00	0,00		
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.325.702.447	543.171.022	40,97	46,06		
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			236.420.000	119.040.000	50,35	50,35		
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			268.845.000	25.600.000	9,52	9,53		
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			182.126.489	90.432.644	49,65	49,67		
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			10.885.147.072	3.390.178.480	31,14	31,70		
	A. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kevenangan Provinsi			241.032.295	53.213.200	22,08	36,39		
	1 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DAU, DBH-DR	Kab.Poso, Kab. Touna, Kab. Tolitoli, Kab. Buol	111.653.000	16.550.000	14,82	41,69		
	2 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan			60.000.000	15.000.000	25,00	32,50		
	3 Penyediaan dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Operasional KPH			69.379.295	21.663.200	31,22	31,22		
	B. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	DAU, DBH-DR	Kab.Donggala, Kab. Parimo, Kab.Touna, Kab. Morut, Kab. Buol	166.970.000	43.200.000	25,87	25,87		
	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			166.970.000	43.200.000	25,87	25,87		
	C. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			216.270.566	53.049.300	24,53	24,73		
	1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	DAU, DBH-DR	Kota Palu, Kab.Sigi, Kab. Touna, Kab. Banggai, Kab. Morowali, Kab. Buol	40.000.000	-	0,00	0,00		
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			22.339.000	2.700.000	12,09	12,09		
	3 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH			153.931.566	50.349.300	32,71	33,00		
	D. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			8.963.967.503	2.815.252.540	31,41	31,55		
	1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	DAU, DBH-DR, DAK	Provinsi Sulawesi Tengah	35.000.000	24.690.070	70,54	71,43		
	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			4.610.079.000	1.064.860.185	23,10	23,25		
	3 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			4.139.455.593	1.669.479.300	40,33	40,47		
	4 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			79.432.985	34.172.985	43,02	43,02		
	5 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			99.999.925	22.050.000	22,05	22,17		
	E. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			1.025.479.668	353.731.100	34,49	35,92		
	1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DAU, DBH-DR	Provinsi Sulawesi Tengah	646.447.088	283.688.700	43,88	44,07		
	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			238.310.000	43.320.000	18,18	24,93		
	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			140.722.580	26.722.400	18,99	17,07		
	F. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			206.722.000	34.206.500	16,55	14,81		
	1 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	DAU, DBH-DR	Kota Palu, Kab. Sigi, Kab.Donggala, Kab. Morowali, Kab.Buol	84.262.000	15.800.000	18,75	18,75		
	2 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan			30.000.000	-	0,00	0,00		
	3 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu			92.460.000	18.406.500	19,91	16,01		
	G. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			64.705.040	37.525.840	58,00	60,78		
	1 Rencana Pengolahan Hasil Hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	DAU	Kota Palu, Kab.Donggala, Kab. Banggai, Kab. Morowali	33.600.000	29.400.000	87,50	92,86		
	2 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			31.105.040	8.125.840	26,12	26,12		

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				710.000.000	104.280.225	14,69	14,75		
A. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi				DAU, DBH-DR	Kab. Sigi	500.000.000	8.995.250	1,80	1,80
1 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi						500.000.000	8.995.250	1,80	1,80
B. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				DAU, DBH-DR	Kab. Banggai, Kab. Bangkape, Kab. Donggala	210.000.000	95.284.975	45,37	45,59
1 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah						15.000.000	-	0,00	0,00
2 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						195.000.000	95.284.975	48,86	49,10
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						4.045.388.174	2.794.529.075	69,08	69,47
A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				DAU, DBH-DR	Provinsi Sulawesi Tengah	4.045.388.174	2.794.529.075	69,08	69,47
1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan						85.772.000	16.465.000	19,20	20,49
2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani						2.887.371.205	2.176.473.135	75,38	75,73
3 Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial						1.072.244.969	601.590.940	56,11	56,52
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						49.999.950	25.980.000	51,96	51,96
A. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				DAU	Kab. Donggala, Kab. Tolitoli, Kab. Banggai	49.999.950	25.980.000	51,96	51,96
1 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						49.999.950	25.980.000	51,96	51,96

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016, maka uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan.

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. Tugas

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kehutanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pembinaan teknis dan penyelenggaraan di bidang kehutanan.
- 2) Melaksanakan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang kehutanan.
- 3) Melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang kehutanan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;

- 2) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
- 3) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- a) Sub Bagian Perencanaan Program
- b) Sub Bagian Keuangan dan Asset
- c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan dan Tata Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan, dan Pengolahan, Pemasaran dan PNBP. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

- 3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- 6) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 7) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- 9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
- 10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
- 11) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan Hutan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :

- a) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
- b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- c) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

d. **Bidang Perlindungan dan KSDAE**

Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan dan KSDAE, mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- 5) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- 6) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

- 7) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 8) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan KSDAE; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan KSDAE, membawahi :

- a) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
- b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL melaksanakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;

- 5) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan DAS dan RHL; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, membawahi :

- a) Seksi Pengelolaan DAS
- b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- c) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat, mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam wilayah Provinsi;

- 5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam wilayah Provinsi;
- 6) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan, sarana dan prasarana Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat, dan pengolahan dan pemasaran hasil Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
- 7) Penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi :

- a) Seksi Penyuluhan
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c) Seksi Hutan Adat

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura)

UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA).

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA;
- 3) Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA;
- 4) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA;

- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan TAHURA;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA;
- 7) Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
- 8) Pelaksanaa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
- 9) Pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA;
- 10) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.
- 11) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Taman Hutan Raya membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
- c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas :
 - Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan Tahura
 - Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura
 - Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan Tahura

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

UPTD UPT KPH terdiri dari 13 (tiga belas) unit KPH, yaitu:

- 1) KPH Dampelas Tinombo adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit IV dan III di Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong;

- 2) UPT KPH Toili Baturube adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIX di Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Morowali Utara;
- 3) UPT KPH Dolago Tanggunung adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VI, IX dan V di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kota Palu;
- 4) UPT KPH Pogogul adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit I di Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli;
- 5) UPT KPH Sintuwu Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XII,X,XI di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi;
- 6) UPT KPH Sivia Patuju adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XVII dan XVI di Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai;
- 7) UPT KPH Balantak adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XX dan XVIII di Kabupaten Banggai;
- 8) UPT KPH Topeasa Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIV di Kabupaten Morowali;
- 9) UPT KPH Pulau Peling adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XXI di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut;
- 10) UPT KPH Topeasa Roa adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIII dan XV di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Tojo Unauna, dan Kabupaten Poso;

- 11) UPT KPH Banawa Lalundu adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VII di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu;
- 12) UPT KPH Kulawi adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VIII di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso;
- 13) UPT KPH Gunung Dako adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit II di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Moutong;

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang operasional pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH dan tugas administrasi kehutanan guna percepatan efisiensi pelayanan publik bidang kehutanan yang berada di luar kawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah KPH;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di wilayah KPH;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH;
- 8) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;

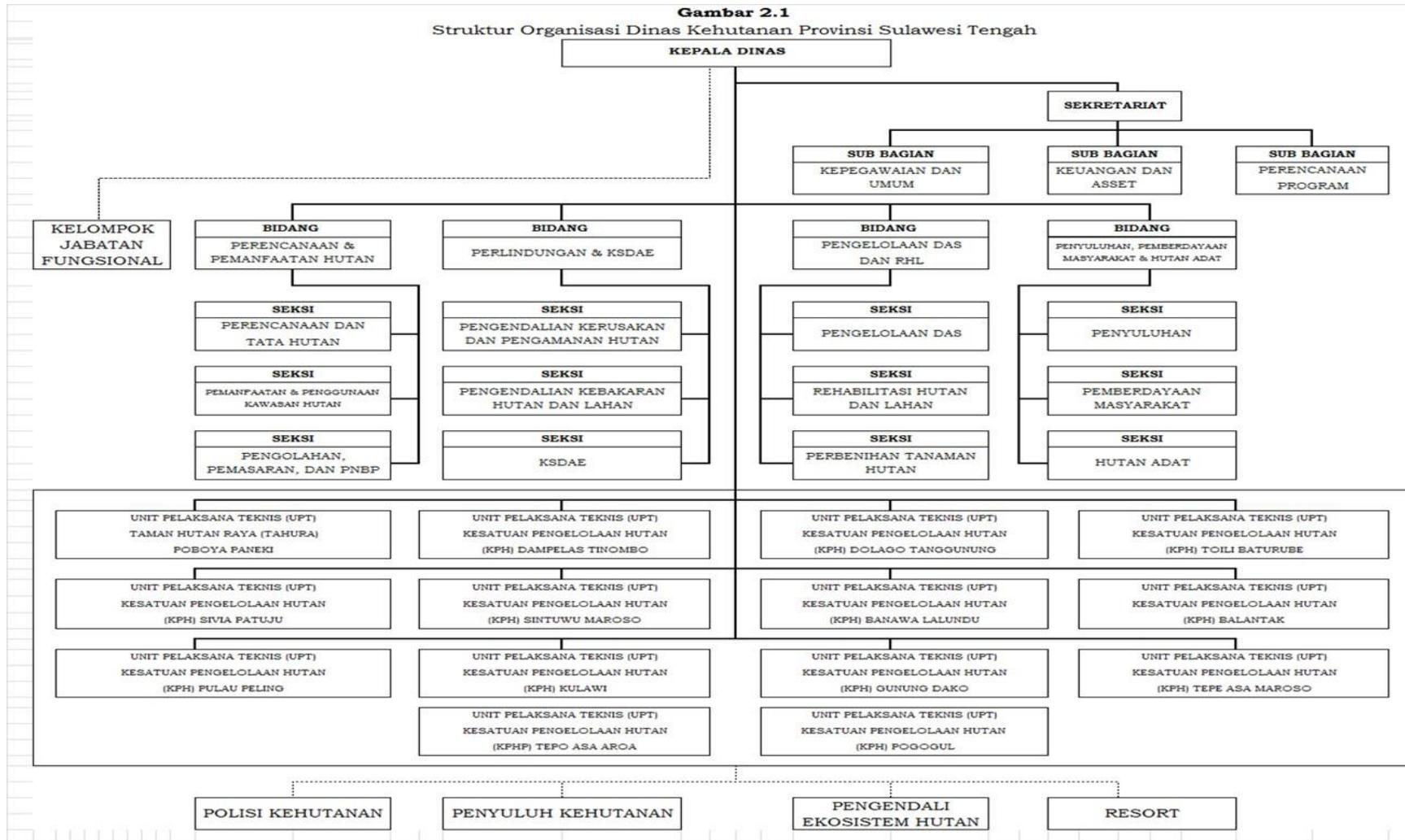
- 9) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- 10) Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik;
- 11) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas :
 - Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan unit KPH.
 - Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH.
 - Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.
 - Resort, mempunyai tugas membantu Kepala KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.

Susunan dan Struktur Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah selengkapnya disajikan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka sinergitas program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di tingkat pusat, serta peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelayanan untuk masing-masing Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Sinkronisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 serta Koordinasi Rencana Pembangunan Kehutanan Tahun 2023 di kabupaten/kota.
- b) Mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional IV yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Wilayah Regional IV.
- c) Melaksanakan Rapat Konsultasi Publik Rancangan Perda Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Tahura Sulteng, Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Statistik Kehutanan Tahun 2022, Rapat Koordinasi Perlindungan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah serta Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KPH tingkat Kabupaten
- d) Melaksanakan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
- e) Melaksanakan Sosialisasi dan Desiminasi PUHH dan PIK serta Fasilitasi/ Sosialisasi HTR yang pesertanya berasal dari UPT KPH dan TAHURA lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk merumuskan solusi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam mewujudkan program prioritas berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Berdasarkan hasil identifikasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi, Kab/Kota dan UPT Kemenhut belum optimal.
4. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
5. Peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih harus ditingkatkan.

B. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
2. Belum optimalnya pelaksanaan dan implementasi program Perhutanan Sosial.
3. Belum optimalnya pelaksanaan dan implementasi program Hutan Adat.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Adat

- A. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).
- B. Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat
- C. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang.

D. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE

1. Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil.
2. Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah.
3. Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan.
4. Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan.

E. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- A. Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini.
- B. Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
- C. Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.
- D. Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH di wilayahnya.
- E. Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat.
- F. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.
- G. Belum seimbangya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku

F. UPTD Tahura

- A. Belum adanya zonasi/pembagian blok-blok areal yang jelas (Definitif).
- B. Masih terjadi kegiatan illegal logging dan alih fungsi kawasan.
- C. Pemanfaatan potensi kawasan sangat terbatas.
- D. Kondisi batas di lapangan kurang jelas dan/atau tidak sesuai lagi dengan peta tata batas.
- E. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran masih lemah.
- F. Pengawasan dan pengamanan sangat terbatas (bersifat temporer) .

- G. SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan sangat terbatas.
- H. Sarana prasarana di lapangan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi belum memadai serta belum ada panduan pelaksanaannya.
- I. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan di dalam kawasan Tahura oleh instansi terkait kurang koordinasi dan keterpaduan dengan petugas dari Tahura sendiri, sehingga hasilnya tidak diketahui.

G. UPTD KPH

1. Penyelenggaraan pengelolaan wilayah KPH belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga teknis dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas penyelenggaraan Diklat Kemenhut untuk SDM KPH belum memenuhi kebutuhan.
4. Kapasitas organisasi masih belum mencerminkan pengelolaan di tingkat tapak.
5. Kurangnya data informasi potensi wilayah KPH yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
6. Konvergensi UPT Kementerian Kehutanan belum mempunyai dasar hukum yang kuat.
7. Peran operasional UPT KPH belum didukung dengan Peraturan Kementerian Kehutanan yang memadai.
8. Penyelenggaraan pengelolaan wilayah KPH belum optimal.
9. Masih kurangnya tenaga teknis dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
10. Kapasitas penyelenggaraan Diklat Kemenhut untuk SDM KPH belum memenuhi kebutuhan.
11. Sarana dan Prasarana KPH belum memadai.
12. Belum selesainya penataan batas luar kawasan hutan serta telah hilangnya dan/atau telah rusaknya sebagian batas luar kawasan hutan di wilayah KPH.
13. Terdapat kawasan hutan di dalam wilayah KPH yang mengalami kerusakan berupa lahan kritis.
14. Perubahan struktur hutan akibat tidak seimbangnya aktivitas pemanfaatan dan pemulihan.

15. Konflik tenurial dan gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan, illegal logging, penguasaan lahan (sertifikasi) dan perladangan yang terjadi/ditemukan di dalam kawasan hutan wilayah KPH.
16. Belum berkembangnya akses pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
17. Kesenjangan antara supply dan demand bahan baku hasil hutan kayu, khususnya kayu untuk kebutuhan energi (kayu bakar) dan hasil hutan bukan kayu (rotan dan getah damar).
18. Belum ada pengembangan jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi.
19. Belum ada pengembangan akses pasar hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu.
20. Keterbatasan infrastruktur di wilayah KPH untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi.
21. Rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap usaha-usaha konservasi, perlindungan dan pemeliharaan kawasan hutan.
22. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lahan di kawasan hutan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu.
23. Belum ada pengakuan secara yuridis (formal) terhadap keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Wana beserta nilai-nilai kearifan lokalnya, yang seharusnya menjadi bagian dalam kegiatan pengelolaan kehutanan.
24. Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana baik dalam Jumlah maupun kualifikasinya dalam pelaksanaan pembangunan KPH Toili Baturube.
25. Belum dipahaminya tujuan dan manfaat pembangunan, KPH
26. Belum kuatnya kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dalam rangka menopang perekonomiannya.

Permasalahan-permasalahan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pencapaian visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yaitu **“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”** dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah khususnya terhadap misi III yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah dan misi VI yaitu menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Misi ini akan diwujudkan melalui Program Penataan Ruang Terintegrasi, Mitigasi Perubahan Iklim dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup. Selain itu, permasalahan tersebut juga berpengaruh terhadap capaian program nasional/internasional, khususnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan serta upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan, namun dengan mengoptimalkan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tetap optimis dapat mendukung untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Adapun strategi yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- 2). Meningkatkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;
- 3). Mewujudkan koordinasi dan penetapan RTRW Provinsi serta koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4). Percepatan pemberian akses kelola hutan social melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat, untuk penyelesaian konflik tenurial dan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan;
- 5). Meningkatkan pengelolaan tata hutan KPH dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- 6). Meningkatkan upaya perlindungan hutan lindung dan hutan produksi serta mengoptimalkan pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;
- 7). Meningkatkan pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya (TAHURA)

Sulawesi Tengah.

8).Meningkatkan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota.

Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai rekomendasi dan catatan penting dalam menyusun rencana program/kegiatan prioritas setiap tahun, sehingga penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta mencapai program nasional/internasional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya, maka indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 adalah *Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara dan Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial*. Oleh karena itu, program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diprioritaskan pada kegiatan yang terkait dengan upaya rehabilitasi hutan dan fasilitasi perhutanan sosial.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diprioritaskan pada program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah rehabilitasi hutan dan fasilitasi perhutanan sosial. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan kebutuhan dananya relative besar adalah :

a. Program Pengelolaan Hutan, kegiatannya :

- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi
- Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

- Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi
 - Perbenihan Tanaman Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan, kegiatannya :
- Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, kegiatannya :
- Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), kegiatannya :
- Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil Koordinasi Rencana Pembangunan Kehutanan Tahun 2022 di kabupaten/kota dan forum SKPD Tahun 2022, maka usulan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Perangkat Daerah : DINAS KEHUTANAN
Periode / Tahun : 2023

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Prov. Sulteng			
	DINAS KEHUTANAN PROV. SULTENG	Kota Palu			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Palu	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	64 %	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	8 Dok	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan	2 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Terlaksananya Monev Kinerja SKPD	14 KPH dan Tahura	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Terlaksananya rapat pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bulanan Dinas Kehutanan Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	
		Kota Palu	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD	2 Dokumen	
		Kota Palu			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	40 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palu	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	Paket	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Palu	Tersedianya Laporan Akuntansi SKPD	2 Dok	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual	1	Dok	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palu	Terkelolanya tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	40	%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan		Bulan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palu	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12	Bulan	
		Kota Palu				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen BMD SKPD	40	%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD		Dok	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	Terlaksananya Pengamanan BMD SKPD	14	Kab/Kota	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD	14	Kab/Kota	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Binwasdal BMD SKPD			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Terlaksananya penatausahaan BMD SKPD	40	%	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	Terlaksananya pemanfaatan BMD SKPD			
		Kota Palu				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	Peningkatan Pelayanan dan SDM Kepegawaian	40	%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Perlengkapan pakaian dinas beserta atribut	1	Paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu	Terlaksananya pendataan dan pengolahan Adm. Pegawai	1	Dok	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu	Terlaksananya koordinasi sistem informasi kepegawaian	14	KPH dan Tahura	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	Terlaksananya Monev Penilaian Kinerja Pegawai	14	KPH dan Tahura	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2	Kali	
		Kota Palu				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum SKPD	40	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	

	Penyediaan Bahan/Material	Kota Palu	Tersedianya Bahan/Material	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kota Palu				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	40	%	
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kota Palu				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kota Palu				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	40	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14 Kab/Kota	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	275	Ha	
		14 Kab/Kota	Kerusakan Kawasan Hutan	0,0081	%	
		14 Kab/Kota	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100	%	
		14 Kab/Kota				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	14 Kab/Kota	Terlaksananya pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	29	Unit	

	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	Termonitornya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	21	Unit	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	Termonitor dan Terevaluasinya Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	8	Unit	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	Terlaksananya Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	16	Unit	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	14 Kab/Kota	Terlaksananya Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	5	Unit	
		14 Kab/Kota				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	14 Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui vegetatif dan sipil teknis	275	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	14 Kab/Kota	Tersedianya RTnRHL diluar Kawasan	14	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	14 Kab/Kota	Terlaksananya Hutan Rakyat di Wilayah KPH	14	KPH/Tahura	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	14 Kab/Kota	Jumlah Bibit Penghijauan Lingkungan	20000	Bibit	
		14 Kab/Kota	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	14	KPH/Tahura	
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	14 Kab/Kota	Terpeliharanya/Terbangunnya Bangunan Persemaian	1	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	14 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	5	Lokasi	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	14 Kab/Kota	Binwasdal Pengembangan Rehabilitasi Lahan	14	KPH/Tahura	
		14 Kab/Kota				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	336	Ha	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	14 Kab/Kota	Terlaksananya patroli pencegahan, pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan serta pembatasan kerusakan hutan di Prov. Sulteng	13	Lokasi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Kab/Kota	Terlaksananya Komunikasi yang terarah dengan Instansi Hukum terkait dalam Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hutan	13	Lokasi	
		14 Kab/Kota				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	14 Kab/Kota	Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2	Unit	

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14 Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen terhadap Penerbitan Izin IUIPHHBK di Wil. Prov. Sulawesi Tengah	2	Unit	
		14 Kab/Kota				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	14 Kab/Kota	Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	65	Unit	
	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	14 Kab/Kota	Termonitornya Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun	30	Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	14 Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	35	Unit	
		14 Kab/Kota				
	Perbenihan Tanaman Hutan	14 Kab/Kota	Terlaksananya perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	1	Unit	
	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	14 Kab/Kota	Terlaksananya penetapan pengadaan dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar	5	Dokumen	
	Sertifikasi Sumber Benih	14 Kab/Kota	Tersedianya data sumber benih potensial	1	Unit	
	Sertifikasi Mutu Bibit	14 Kab/Kota	Tersedianya jaminan mutu bibit tanaman hutan yang berkualitas	1	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	14 Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BINWASDAL Peredaran Benih dan/atau bibit di KPH	14	KPH/Tahura	
		14 Kab/Kota				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	14 Kab/Kota	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	70	%	
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	14 Kab/Kota	Terlaksananya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	3	Kali	
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	14 Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran CITES	3	Kali	
		14 Kab/Kota				
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	14 Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1	Lokasi	
	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	14 Kab/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1	Dokumen	

	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	14 Kab/Kota	Terpeliharanya Ekosistem Karst	1	Kegiatan	
	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	14 Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1	Dokumen	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	14 Kab/Kota	Terkendalinya Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	14 Kab/Kota	Meningkatnya nilai efektifitas Pengelolaan Tahura (Data Spasial Kaw. Tahura)	70	%	
		14 Kab/Kota	Meningkatnya Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	1	Lokasi	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	14 Kab/Kota	Meningkatnya Pembinaan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	6	Desa	
		14 Kab/Kota				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	14 Kab/Kota	Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	1300	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	14 Kab/Kota	Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	1300	Ha	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	14 Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kompetensi, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana tenaga penyuluh kehutanan	14	KPH	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	14 Kab/Kota	Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	28	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	14 Kab/Kota	Luas fasilitasi Pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	1300	Ha	
		14 Kab/Kota				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	14 Kab/Kota	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	100	%	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Dokumen	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	14 Kab/Kota	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan DAS berbasis WEB	1	Paket	
		14 Kab/Kota	Tersedianya bibit penghijauan lingkungan sekitar wilayah DAS yang dibagikan kepada masyarakat	1000	Batang	

	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	14 Kab/Kota	Terlaksananya Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi DAS Bagi Pemegang IPPKH (26 IPPKH)	26	IPPKH	
		14 Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Kegiatan Pengelolaan DAS Bagi Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Sekitar DAS	26	IPPKH	
	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	14 Kab/Kota	Terlaksananya Rapat Forum DAS yang diselenggarakan dalam setahun	2	Kegiatan	
	UPTD TAHURA	Kab. Sigi				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Sigi	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sigi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sigi	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sigi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Sigi				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Sigi				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sigi	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Paket	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Sigi				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Sigi	Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	2	Ha	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Kab. Sigi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	5,195	Ha	
		Kab. Sigi	Nilai indeks efektivitas kawasan Tahura meningkat setiap tahun	70	%	
	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Kab. Sigi	Dokumen Perencanaan Pengelolaan TAHURA Provinsi yang tersusun	1	Dokumen	
		Kab. Sigi	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kawasan TAHURA Provinsi kepada Masyarakat sekitar	8	Desa/Kel	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Kab. Sigi	Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	8	Desa/Kel	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Kab. Sigi	Jumlah Kunjungan wisata alam di TAHURA Provinsi bertambah	6,000	Orang	
		Kab. Sigi	Sarana dan Prasarana Wisata Alam di TAHURA Provinsi bertambah	2	Unit	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	Kab. Sigi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan di sekitar Kawasan TAHURA Provinsi	8	Kelompok	
		Kab. Sigi	Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di Kawasan TAHURA Provinsi	16	Ha	
	UPT KPH DAMPELAS TINOMBO	Kab. Donggala				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Donggala	Bahan Logistik Kantor	3	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Donggala	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Donggala	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Paket	
		Kab. Donggala				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	3	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Donggala	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Donggala	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Donggala	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Donggala				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Donggala	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Donggala	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha	
		Kab. Donggala	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
		Kab. Donggala				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Donggala	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Donggala	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	50	Km	
		Kab. Donggala	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	200	Ha	
		Kab. Donggala	Dokumen Rancangan Tata Hutan	2	Dokumen	
		Kab. Donggala				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Donggala	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Donggala	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	2	Dokumen	
		Kab. Donggala				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Donggala	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Donggala	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	

		Kab. Donggala	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Donggala	Dokumen RTn-RHL	-	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha	
		Kab. Donggala	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Donggala	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Donggala	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Donggala	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Donggala	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Donggala	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	1	Dokumen	
		Kab. Donggala	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	5	Orang	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Donggala	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Donggala	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Donggala	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	2	Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Donggala	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	9	Unit	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Donggala	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	-	Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Donggala	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	3	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Donggala	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Donggala	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Donggala	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Donggala	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Donggala	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Donggala	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Donggala				

	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		- Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Donggala	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh		- Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Donggala	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Donggala	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Donggala	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS		- Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Donggala	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH DOLAGO TANGGUNUNG	Kab. Parimo				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Parimo	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Parimo	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Parimo	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Parimo	Bahan Logistik Kantor	2	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Parimo	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Parimo	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	

		Kab. Parimo			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Parimo	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	1 %	
	Pengadaan Mebel	Kab. Parimo	Meubelair kantor		Paket
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Parimo	Peralatan dan Mesin Lainnya		Paket
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Parimo	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Parimo	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Parimo	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Parimo	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Parimo	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket
		Kab. Parimo			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Parimo	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Parimo	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Parimo	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Parimo	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Parimo	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Paket
		Kab. Parimo			
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Parimo	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha
		Kab. Parimo	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen
		Kab. Parimo			
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Parimo	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Parimo	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH		
		Kab. Parimo	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH		Ha
		Kab. Parimo	Dokumen Rancangan Tata Hutan		
		Kab. Parimo			
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Parimo	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Parimo	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	3	Dokumen

		Kab. Parimo			
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Parimo	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH		- Unit
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Parimo	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	3	Unit
		Kab. Parimo	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	3	Unit
		Kab. Parimo			
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Parimo	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Parimo	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Parimo	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha
		Kab. Parimo	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2	Kelompok
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Parimo	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Parimo	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Parimo	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi
		Kab. Parimo	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Parimo	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok
		Kab. Parimo			
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Parimo	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	10	Kali
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Parimo	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	10	Kali

		Kab. Parimo	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan		- Dokumen	
		Kab. Parimo	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	5	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Parimo	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan		- Orang	
		Kab. Parimo	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan		- Orang	
		Kab. Parimo				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Parimo	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		- Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Parimo	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan unit usaha pengelolaan HHBK	3	Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Parimo	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		- Unit	
		Kab. Parimo				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Parimo	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		- Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Parimo	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	3	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Parimo	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng		- Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Parimo	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan		- Kali	
		Kab. Parimo				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Parimo	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun		- %	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Parimo	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		- Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Parimo	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		- Kali	

	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Parimo	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Parimo				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Parimo	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Parimo	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	-	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Parimo	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Parimo	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Parimo	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Parimo				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Parimo	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Parimo	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Parimo	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Parimo	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH TOILI BATURUBE	Kab. Banggai				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Banggai	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banggai	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banggai	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banggai	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banggai	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banggai	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Banggai				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banggai	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	3	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Banggai	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banggai	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banggai	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banggai	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banggai	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banggai	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banggai	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Banggai				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banggai	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banggai	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banggai	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banggai	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banggai	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Banggai				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Banggai	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha	
		Kab. Banggai	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	2	Dokumen	
		Kab. Banggai				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Banggai	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Banggai	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Banggai	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Banggai	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Banggai				

	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Banggai	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	2	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Banggai	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	2	Dokumen	
		Kab. Banggai				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Banggai	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Banggai	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Banggai	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	5	Unit	
		Kab. Banggai				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Banggai	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Banggai	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Banggai	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha	
		Kab. Banggai	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Banggai	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Banggai	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Banggai	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Banggai	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Banggai	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	

		Kab. Banggai			
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Banggai	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	16	Kali
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Banggai	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	16	Kali
		Kab. Banggai	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	6	Dokumen
		Kab. Banggai	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	5	Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Banggai	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang
		Kab. Banggai	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang
		Kab. Banggai			
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Banggai	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	Unit
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Banggai	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	6	Kelompok
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Banggai	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Unit
		Kab. Banggai			
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Banggai	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	-	Unit
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Banggai	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	10	Unit
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Banggai	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Banggai	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali
		Kab. Banggai			
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Banggai	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%

	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Banggai	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		- Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Banggai	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		- Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Banggai	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting		- Kelompok	
		Kab. Banggai				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Banggai	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Banggai	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		- Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Banggai	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh		- Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Banggai	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	10	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Banggai	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Banggai				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Banggai	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	2	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Banggai	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	2	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Banggai	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS		- Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Banggai	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	2	Kegiatan	
	UPT KPH BANAWA LALUNDU	Kab. Donggala				

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Donggala	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Donggala	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Donggala	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Kab. Donggala				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	-	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Donggala	Meubelair kantor			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala	Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Donggala	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Donggala	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Donggala				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Donggala	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Donggala	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala	Peralatan dan Mesin Lainnya		Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Donggala	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha	
		Kab. Donggala	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
		Kab. Donggala				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Donggala	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Donggala	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	

		Kab. Donggala	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Donggala	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Donggala				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Donggala	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Donggala	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1	Dokumen	
		Kab. Donggala				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Donggala	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Donggala	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
		Kab. Donggala	Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Donggala	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha	
		Kab. Donggala	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	22000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Donggala	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	

	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Donggala	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Donggala	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Donggala	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Donggala	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	-	Dokumen	
		Kab. Donggala	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Donggala	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Donggala	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Donggala	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	5	Ha	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Donggala	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	6	Unit	
		Kab. Donggala				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Donggala	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	-	Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Donggala	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	8	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Donggala	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	

	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Donggala	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan		- Kali	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Donggala	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun		- %	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Donggala	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		- Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Donggala	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		- Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Donggala	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting		- Kelompok	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		100 Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		- Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Donggala	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh		- Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Donggala	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial		2 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial		100 Ha	
		Kab. Donggala				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Donggala	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng		- Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Donggala	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng		- Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Donggala	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS		- Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Donggala	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS		- Kegiatan	

	UPT KPH KULAWI	Kab. Sigi				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Sigi	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sigi	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sigi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Sigi				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sigi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	100	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sigi	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sigi	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Sigi				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sigi	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Sigi				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Sigi	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	17	Ha	
		Kab. Sigi	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	

		Kab. Sigi			
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Sigi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Sigi	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km
		Kab. Sigi	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha
		Kab. Sigi	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen
		Kab. Sigi			
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Sigi	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Sigi	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1	Dokumen
		Kab. Sigi			
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Sigi	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	4	Unit
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Sigi	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	4	Unit
		Kab. Sigi	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	4	Unit
		Kab. Sigi			
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Sigi	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	17	Ha
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Sigi	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Sigi	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi	17	Ha
		Kab. Sigi	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	Kelompok
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Sigi	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	15,000	Batang
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Sigi	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Sigi	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Sigi	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Sigi	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Sigi				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Sigi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Sigi	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Sigi	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	1	Dokumen	
		Kab. Sigi	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	2	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Sigi	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Sigi	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Sigi				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Sigi	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1	Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Sigi	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	1	Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Sigi	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Unit	
		Kab. Sigi				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Sigi	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	0	Unit	

	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Sigi	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	0	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Sigi	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Sigi	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Sigi				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Sigi	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Sigi	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Sigi	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Kab. Sigi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Sigi				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Sigi	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Sigi	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	4	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Sigi	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Sigi	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	5	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Sigi	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Sigi				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Sigi	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	

	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Sigi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Sigi	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Sigi	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH SINTUWU MAROSO	Kab. Poso				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Poso	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Poso	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Poso	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Poso	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Poso	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Poso	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Poso				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Poso	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	3	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Poso	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Poso	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Poso	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Poso	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Poso	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Poso	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Poso	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Poso				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Poso	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Poso	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Poso	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Poso	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Poso	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Poso				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Poso	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	17	Ha	
		Kab. Poso	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
		Kab. Poso				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Poso	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Poso	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Poso	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Poso	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Poso				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Poso	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Poso	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	2	Dokumen	
		Kab. Poso				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Poso	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Poso	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
		Kab. Poso	Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Poso				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Poso	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	17	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Poso	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Poso	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	17	Ha	

		Kab. Poso	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	3	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Poso	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	22,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Poso	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Poso	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Poso	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Poso	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Poso				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Poso	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Poso	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Poso	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	2	Dokumen	
		Kab. Poso	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	6	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Poso	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Poso	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Poso				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Poso	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	Unit	

	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Poso	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	10	Ha	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Poso	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	10	Unit	
		Kab. Poso				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Poso	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		- Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Poso	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	7	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Poso	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng		- Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Poso	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan		- Kali	
		Kab. Poso				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Poso	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun		- %	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Poso	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		- Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Poso	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		- Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Poso	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting		- Kelompok	
		Kab. Poso				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Poso	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Poso	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		- Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Poso	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh		- Orang	

	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Poso	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	2	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Poso	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Poso				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Poso	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Poso	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Poso	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Poso	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH SIVIA PATUJU	Kab. Tojo UnaUna				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Tojo UnaUna	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tojo UnaUna	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tojo UnaUna	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tojo UnaUna	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tojo UnaUna	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tojo UnaUna	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo UnaUna	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	3	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tojo UnaUna	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tojo UnaUna	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tojo UnaUna	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tojo UnaUna	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tojo UnaUna	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tojo UnaUna	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tojo UnaUna	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Tojo UnaUna				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Tojo UnaUna	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	17	Ha	
		Kab. Tojo UnaUna	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Tojo UnaUna	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Tojo UnaUna	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Tojo UnaUna	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Tojo UnaUna	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	Review Dokumen RPHJP			
		Kab. Tojo UnaUna	Penyusunan Dokumen RPHJPD	2	Dokumen	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	
		Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Tojo UnaUna				

	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tojo UnaUna	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	17	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Tojo UnaUna	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tojo UnaUna	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	17	Ha	
		Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	5	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Tojo UnaUna	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Tojo UnaUna	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Tojo UnaUna	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	2	Dokumen	
		Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	6	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	

		Kab. Tojo UnaUna	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan		- Orang	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		- Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	10	Ha	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Tojo UnaUna	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	5	Unit	
		Kab. Tojo UnaUna				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		- Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Tojo UnaUna	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	2	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Tojo UnaUna	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng		- Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Tojo UnaUna	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan		- Kali	
		Kab. Tojo UnaUna				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Tojo UnaUna	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun		- %	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Tojo UnaUna	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		- Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Tojo UnaUna	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		- Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Kab. Tojo UnaUna	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting		- Kelompok	
		Kab. Tojo UnaUna				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		100 Ha	

	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial		- Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Tojo UnaUna	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh		- Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial		3 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Tojo UnaUna				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Tojo UnaUna	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng		1 Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng		1 Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS		- Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Tojo UnaUna	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS		1 Kegiatan	
	UPT KPH BALANTAK	Kab. Bangkep				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Bangkep	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD		100 %	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkep	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD		100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkep	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangkep	Bahan Logistik Kantor		1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangkep	Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkep	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Paket	
		Kab. Bangkep				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkep	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah		100 %	
	Pengadaan Mebel	Kab. Bangkep	Meubelair kantor		1 Paket	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkep	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkep	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkep	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkep	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkep	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkep	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Bangkep				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkep	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangkep	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkep	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangkep	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkep	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Bangkep				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Bangkep	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha	
		Kab. Bangkep	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
		Kab. Bangkep				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Bangkep	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Bangkep	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Bangkep	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Bangkep	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Bangkep				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Bangkep	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Bangkep	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	2	Dokumen	
		Kab. Bangkep				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Bangkep	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	-	Unit	

	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Bangkep	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	8	Unit	
		Kab. Bangkep	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	8	Unit	
		Kab. Bangkep				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bangkep	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Bangkep	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bangkep	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha	
		Kab. Bangkep	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	3	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bangkep	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Bangkep	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Bangkep	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Bangkep	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Bangkep	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Bangkep				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Bangkep	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Bangkep	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Bangkep	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	4	Dokumen	

		Kab. Bangkep	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	4	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Bangkep	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Bangkep	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Bangkep				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Bangkep	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Bangkep	Fasilitasi Pengembangan Budidaya dan unit usaha pengelolaan HHBK	4	Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Bangkep	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Unit	
		Kab. Bangkep				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Bangkep	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	-	Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Bangkep	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	14	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Bangkep	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Bangkep	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Bangkep				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Bangkep	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Bangkep	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Bangkep	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Bangkep	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	

		Kab. Bangkep			
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Bangkep	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Bangkep	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	-	Kelompok
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Bangkep	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Bangkep	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	3	Kelompok
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Bangkep	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha
		Kab. Bangkep			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Bangkep	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bangkep	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Bangkep	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Bangkep	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan
	UPT KPH PULAU PELING	Kab. Balut			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Balut	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balut	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balut	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balut	Bahan Logistik Kantor	1	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balut	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balut	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket
		Kab. Balut			

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balut	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	3	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Balut	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Balut	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balut	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balut	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balut	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balut	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	#VALUE!	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balut	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Balut				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balut	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Balut	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Balut	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balut	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balut	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Balut				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Balut	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	11	Ha	
		Kab. Balut	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
		Kab. Balut				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Balut	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Balut	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Balut	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Balut	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Balut				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Balut	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	-	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Balut	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	2	Dokumen	
		Kab. Balut				

	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Balut	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	4	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Balut	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Balut	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Balut				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Balut	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	11	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Balut	Dokumen RTn-RHL	-	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Balut	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	11	Ha	
		Kab. Balut	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Balut	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Balut	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Balut	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Balut	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Balut	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Balut				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Balut	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	10	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Balut	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	10	Kali	

		Kab. Balut	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	1	Dokumen	
		Kab. Balut	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	3	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Balut	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Balut	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Balut				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Balut	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Balut	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	2	Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Balut	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Unit	
		Kab. Balut				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Balut	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	-	Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Balut	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	2	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Balut	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Balut	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Balut				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Balut	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Balut	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Balut	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	

	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Balut	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Balut				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Balut	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Balut	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	-	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Balut	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Balut	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Balut	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Balut				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Balut	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Balut	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Balut	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Balut	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH TEPO ASA AROA	Kab. Morut				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Morut	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Morut	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morut	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morut	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Morut	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morut	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Morut				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morut	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	100	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Morut	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morut	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morut	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morut	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morut	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morut	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morut	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Morut				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morut	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morut	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morut	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morut	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morut	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Morut				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Morut	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha	
		Kab. Morut	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen	
		Kab. Morut				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Morut	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Morut	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Morut	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Morut	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Morut				

	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Morut	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Morut	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1	Dokumen	
		Kab. Morut				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Morut	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Morut	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	
		Kab. Morut	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	5	Unit	
		Kab. Morut				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morut	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Morut	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morut	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha	
		Kab. Morut	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	3	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morut	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Morut	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morut	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Morut	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Morut	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	

		Kab. Morut			
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Morut	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	10	Kali
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Morut	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	10	Kali
		Kab. Morut	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	-	Dokumen
		Kab. Morut	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Morut	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang
		Kab. Morut	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang
		Kab. Morut			
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Morut	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1	Unit
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Morut	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	1	Kelompok
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Morut	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Unit
		Kab. Morut			
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Morut	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	2	Unit
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Morut	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	2	Unit
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Morut	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Morut	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali
		Kab. Morut			
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Morut	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%

	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Morut	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		- Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Morut	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		- Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Morut	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting		- Kelompok	
		Kab. Morut				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Morut	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Morut	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Morut	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh		- Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Morut	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Morut	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Morut				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Morut	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Morut	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Morut	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS		- Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Morut	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH TEPE ASA MAROSO	Kab. Morowali				

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Morowali	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Morowali	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Morowali				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morowali	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	100	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Morowali	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali	Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	#VALUE!	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Morowali				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali	Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Paket	
		Kab. Morowali				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Morowali	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27	Ha	
		Kab. Morowali	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen	
		Kab. Morowali				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Morowali	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Morowali	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	

		Kab. Morowali	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Morowali	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Morowali				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Morowali	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Morowali	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1	Dokumen	
		Kab. Morowali				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Morowali	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	25	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Morowali	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	5	Unit	
		Kab. Morowali	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	25	Unit	
		Kab. Morowali				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morowali	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	27	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Morowali	Dokumen RTn-RHL	-	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morowali	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	27	Ha	
		Kab. Morowali	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morowali	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	20,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Morowali	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morowali	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	
		Kab. Morowali	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Kelompok	

	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Morowali	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kelompok	
		Kab. Morowali				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Morowali	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12	Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Morowali	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	12	Kali	
		Kab. Morowali	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	1	Dokumen	
		Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	15	Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	-	Orang	
		Kab. Morowali	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	-	Orang	
		Kab. Morowali				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Morowali	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2	Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Morowali	Fasilitasi Pengembangan Budidaya dan Unit Usaha Pengolahan HHBK	2	Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Morowali	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Unit	
		Kab. Morowali				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Morowali	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	5	Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Morowali	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	5	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Morowali	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	

	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Morowali	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Morowali				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Morowali	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Morowali	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Morowali	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Morowali	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Morowali				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Morowali	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Morowali	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	10	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Morowali	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Morowali	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	10	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Morowali	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Morowali				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Morowali	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	-	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Morowali	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	-	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Morowali	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Morowali	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	-	Kegiatan	

	UPT KPH GUNUNG DAKO	Kab. Tolitoli			
		Kab. Tolitoli	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tolitoli	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tolitoli	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tolitoli	Bahan Logistik Kantor	1	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tolitoli	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tolitoli	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket
		Kab. Tolitoli			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tolitoli	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	100	%
	Pengadaan Mebel	Kab. Tolitoli	Meubelair kantor	1	Paket
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tolitoli	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tolitoli	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tolitoli	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tolitoli	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tolitoli	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tolitoli	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket
		Kab. Tolitoli			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tolitoli	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tolitoli	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tolitoli	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tolitoli	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tolitoli	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket
		Kab. Tolitoli			
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Tolitoli	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	12	Ha
		Kab. Tolitoli	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen
		Kab. Tolitoli			

	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Tolitoli	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Tolitoli	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	-	Km	
		Kab. Tolitoli	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	-	Ha	
		Kab. Tolitoli	Dokumen Rancangan Tata Hutan	-	Dokumen	
		Kab. Tolitoli				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Tolitoli	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Tolitoli	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1	Dokumen	
		Kab. Tolitoli				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	
		Kab. Tolitoli	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1	Unit	
		Kab. Tolitoli				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tolitoli	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	12	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Tolitoli	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tolitoli	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	12	Ha	
		Kab. Tolitoli	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	4	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tolitoli	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	25,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Tolitoli	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	-	Unit	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tolitoli	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Lokasi	

		Kab. Tolitoli	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		- Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Tolitoli	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara		- Kelompok	
		Kab. Tolitoli				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Tolitoli	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		12 Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Tolitoli	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.		12 Kali	
		Kab. Tolitoli	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan		3 Dokumen	
		Kab. Tolitoli	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan		10 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Tolitoli	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan		- Orang	
		Kab. Tolitoli	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan		- Orang	
		Kab. Tolitoli				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Tolitoli	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		2 Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK		2 Kelompok	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Tolitoli	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		- Unit	
		Kab. Tolitoli				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Tolitoli	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		8 Unit	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Tolitoli	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		8 Unit	

	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Tolitoli	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Tolitoli	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Tolitoli				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Tolitoli	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Tolitoli	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Tolitoli	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Tolitoli	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Tolitoli				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Tolitoli	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Tolitoli	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	3	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Tolitoli	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Tolitoli				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Tolitoli	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Tolitoli	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Tolitoli	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	
	UPT KPH POGOGUL	Kab. Buol				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Buol	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buol	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100	%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buol	Bahan Logistik Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buol	Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buol	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	
		Kab. Buol				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	3	%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Buol	Meubelair kantor	1	Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buol	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buol	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buol	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buol	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buol	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	
		Kab. Buol				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buol	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buol	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Paket	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buol	Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buol	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buol	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	
		Kab. Buol				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kab. Buol	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	12	Ha	

		Kab. Buol	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah		- Dokumen	
		Kab. Buol				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kab. Buol	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan		- Dokumen	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Buol	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH		- Km	
		Kab. Buol	Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH		- Ha	
		Kab. Buol	Dokumen Rancangan Tata Hutan		- Dokumen	
		Kab. Buol				
	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kab. Buol	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah		- Dokumen	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Buol	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1	Dokumen	
		Kab. Buol				
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Buol	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH		- Unit	
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Buol	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH		- Unit	
		Kab. Buol	Fasilitas Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	2	Unit	
		Kab. Buol				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Buol	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	12	Ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Kab. Buol	Dokumen RTn-RHL	1	Dokumen	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Buol	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	12	Ha	
		Kab. Buol	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	3	Kelompok	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Buol	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	22,000	Batang	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kab. Buol	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan		- Unit	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Buol	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan		- Lokasi	
		Kab. Buol	Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		- Kelompok	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Buol	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara		- Kelompok	
		Kab. Buol				
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kab. Buol	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		- Kali	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Buol	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	11	Kali	
		Kab. Buol	Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	1	Dokumen	
		Kab. Buol	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan		Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Buol	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan		- Orang	
		Kab. Buol	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan		- Orang	
		Kab. Buol				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Buol	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		- Unit	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Buol	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	10	Ha	
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Buol	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	11	Unit	
		Kab. Buol				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Buol	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		- Unit	

	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kab. Buol	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	7	Unit	
	Perbenihan Tanaman Hutan	Kab. Buol	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	-	Unit	
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Buol	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	-	Kali	
		Kab. Buol				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Buol	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	-	%	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Buol	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	Lokasi	
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Buol	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	-	Kali	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Kab. Buol	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	-	Kelompok	
		Kab. Buol				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Kab. Buol	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Buol	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	-	Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Buol	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	-	Orang	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Buol	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	12	Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Buol	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Ha	
		Kab. Buol				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Kab. Buol	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	1	Kegiatan	

	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Buol	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	1	Kegiatan	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kab. Buol	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	-	Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Buol	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	1	Kegiatan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dititikberatkan pada prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan kepada upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana guna mengantisipasi perubahan iklim.

Substansi inti pelaksanaan prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, meliputi :

1. Perubahan iklim. Indikator penting dalam substansi inti ini adalah :
 - a. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut.
 - b. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun.
 - c. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh, diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
2. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator pencapaian substansi inti adalah :
 - a. Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun.
 - b. Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya.
3. Penanggulangan bencana dengan indikator pencapaian substansi inti adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah memastikan sumber daya hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Tengah terkelola dengan baik.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran dalam Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan secara Berkelanjutan

3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Kehutanan Tahun 2023

Dalam menentukan program dan kegiatan tahun 2023, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan adalah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Maka dirumuskan program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kebijakan : Peningkatan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), produktifitas SDH serta peningkatan pengelolaan DAS serta rehabilitasi hutan dan lahan
 - Program Pengelolaan Hutan, kegiatannya :
 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi
 - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi
 - Perbenihan Tanaman Hutan

- Program Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), kegiatannya :
 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 2. Kebijakan : Peningkatan Pelindungan, konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, kegiatannya :
 - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan, kegiatannya :
 - Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3. Kebijakan : Peningkatan kapasitas dan areal kelola masyarakat serta penyelesaian konflik tenurial
 - Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, kegiatannya :
 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 Dinas Kehutanan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : DINAS KEHUTANAN
 Periode / Tahun : 2023
 Prakiraan Maju : 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		Prov. Sulteng		91,256,790,000	DAU Murni				108,538,920,000
01.00	DINAS KEHUTANAN PROV. SULTENG		Kota Palu		69,330,892,721	DAU Murni				84,536,943,815
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kota Palu	64	%	66,521,804,332	DAU Murni	66	%	81,461,359,017
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	Kota Palu	8	Dok	719,900,000	DAU Murni	8	Dok	827,885,000
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan	Kota Palu	2	Dok	201,250,000	DAU Murni	2	Dok	231,437,500
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1	Dok	11,500,000	DAU Murni	1	Dok	13,225,000
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1	Dok	8,050,000	DAU Murni	1	Dok	9,257,500
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kota Palu	1	Dok	19,550,000	DAU Murni	1	Dok	22,482,500
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu	1	Dok	13,800,000	DAU Murni	1	Dok	15,870,000
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monev Kinerja SKPD	Kota Palu	14	KPH dan Tahura	270,250,000	DAU Murni	14	KPH dan Tahura	310,787,500
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bulanan Dinas Kehutanan Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu		Bulan	195,500,000	DAU Murni		Bulan	224,825,000
		Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD	Kota Palu	2	Dokumen	-	DAU Murni	2	Dokumen	-
			Kota Palu			-				-
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	Kota Palu	40	%	49,316,600,636	DAU Murni	60	%	60,130,171,938
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	1	Tahun	49,184,350,636	DAU Murni	1	Tahun	59,978,084,438
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu		Dok	-	DAU Murni		Dok	-
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	Kota Palu		Paket	-	DAU Murni		Paket	-
3.28.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Akuntansi SKPD	Kota Palu	2	Dok	23,000,000	DAU Murni	2	Dok	26,450,000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual	Kota Palu	1	Dok	80,500,000	DAU Murni	1	Dok	92,575,000
3.28.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelolanya tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kota Palu	40	%	17,250,000	DAU Murni	60	%	19,837,500
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Kota Palu		Bulan	-	DAU Murni		Bulan	-
3.28.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palu	12	Bulan	11,500,000	DAU Murni	12	Bulan	13,225,000
			Kota Palu			-	DAU Murni			-
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD SKPD	Kota Palu	40	%	201,250,000	DAU Murni	60	%	231,437,500
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Kota Palu		Dok	-	DAU Murni		Dok	-

3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan BMD SKPD	Kota Palu	14	Kab/Kota	138,000,000	DAU Murni		14	Kab/Kota	158,700,000
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD	Kota Palu	14	Kab/Kota	28,750,000	DAU Murni		14	Kab/Kota	33,062,500
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Binwasdal BMD SKPD	Kota Palu				DAU Murni				
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu			-	DAU Murni				-
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD SKPD	Kota Palu	40	%	34,500,000	DAU Murni	60	%		39,675,000
3.28.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pemanfaatan BMB SKPD	Kota Palu			-	DAU Murni				-
			Kota Palu			-	DAU Murni				-
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan dan SDM Kepegawaian	Kota Palu	40	%	575,000,000	DAU Murni	60	%		661,250,000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Perlengkapan pakaian dinas beserta atribut	Kota Palu	1	Paket	-	DAU Murni		1	Paket	-
3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan Adm. Pegawai	Kota Palu	1	Dok	115,000,000	DAU Murni		1	Dok	132,250,000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi sistem informasi kepegawaian	Kota Palu	14	KPH dan Tahura	115,000,000	DAU Murni		14	KPH dan Tahura	132,250,000
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monev Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	14	KPH dan Tahura	172,500,000	DAU Murni		14	KPH dan Tahura	198,375,000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Palu	2	Kali	172,500,000	DAU Murni		2	Kali	198,375,000
			Kota Palu				DAU Murni				
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kota Palu	40	%	1,086,750,000	DAU Murni	60	%		1,249,762,500
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	1	Paket	57,500,000	DAU Murni		1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	1	Paket	23,000,000	DAU Murni		1	Paket	26,450,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1	Paket	253,000,000	DAU Murni		1	Paket	290,950,000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	1	Paket	69,000,000	DAU Murni		1	Paket	79,350,000
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Kota Palu	1	Paket	155,250,000	DAU Murni		1	Paket	178,537,500
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	1	Paket	529,000,000	DAU Murni		1	Paket	608,350,000
			Kota Palu				DAU Murni				
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kota Palu	40	%	11,938,845,366	DAU Murni	60	%		15,274,875,000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kota Palu	1	Paket	287,500,000	DAU Murni		1	Paket	330,625,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	1	Paket	575,000,000	DAU Murni		1	Paket	661,250,000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	1	Paket	11,076,345,366	DAU Murni		1	Paket	14,283,000,000
			Kota Palu				DAU Murni				
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	40	%	782,000,000	DAU Murni	60	%		899,300,000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	1	Paket	345,000,000	DAU Murni		1	Paket	396,750,000
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	1	Paket	11,500,000	DAU Murni		1	Paket	13,225,000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1	Paket	425,500,000	DAU Murni		1	Paket	489,325,000
			Kota Palu				DAU Murni				
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Palu	40	%	1,901,458,330	DAU Murni	60	%		2,186,677,079
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	1	Paket	287,500,000	DAU Murni		1	Paket	330,625,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	1	Paket	575,000,000	DAU Murni		1	Paket	661,250,000

3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	1	Paket	693,958,330	DAU Murni	1	Paket	798,052,079
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	1	Paket	345,000,000	DAU Murni	1	Paket	396,750,000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	14 Kab/Kota	275	Ha	1,377,873,389	DAU Murni	300	Ha	1,442,854,798
		Kerusakan Kawasan Hutan	14 Kab/Kota	0,0081	%	632,500,000	DAU Murni	0,0079	%	727,375,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	14 Kab/Kota	100	%	356,500,000	DAU Murni	100	%	409,975,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	14 Kab/Kota	29	Unit	149,500,000	DAU Murni	29	Unit	171,925,000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Termonitornya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	21	Unit	69,000,000	DAU Murni	21	Unit	79,350,000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Termonitor dan Terevaluasinya Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	8	Unit	46,000,000	DAU Murni	8	Unit	52,900,000
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	14 Kab/Kota	16	Unit	17,250,000	DAU Murni	16	Unit	19,837,500
3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	14 Kab/Kota	5	Unit	17,250,000	DAU Murni	5	Unit	19,837,500
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui vegetatif dan sipil teknis	14 Kab/Kota	275	Ha	1,205,373,389	DAU Murni	300	Ha	1,244,479,798
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersedianya RTnRHL diluar Kawasan	14 Kab/Kota	14	Dokumen	80,500,000	DAU Murni	14	Dokumen	92,575,000
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Hutan Rakyat di Wilayah KPH	14 Kab/Kota	14	KPH/Tahura	92,000,000	DAU Murni	14	KPH/Tahura	105,800,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Penghijauan Lingkungan	14 Kab/Kota	20000	Bibit	649,373,389	DAU Murni	20000	Bibit	641,929,798
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	14 Kab/Kota	14	KPH/Tahura	-	DAU Murni	14	KPH/Tahura	-
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terpeliharanya/terbangunnya Bangunan Persemaian	14 Kab/Kota	1	Unit	119,000,000	DAU Murni	1	Unit	100,000,000
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	14 Kab/Kota	5	Lokasi	172,500,000	DAU Murni	5	Lokasi	198,375,000
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Binwasdal Pengembangan Rehabilitasi Lahan	14 Kab/Kota	14	KPH/Tahura	92,000,000	DAU Murni	14	KPH/Tahura	105,800,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	14 Kab/Kota	336	Ha	632,500,000	DAU Murni	326	Ha	727,375,000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya patroli pencegahan, pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan serta pembatasan kerusakan hutan di Prov. Sulteng	14 Kab/Kota	13	Lokasi	517,500,000	DAU Murni	13	Lokasi	595,125,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Komunikasi yang terarah dengan Instansi Hukum terkait dalam Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hutan	14 Kab/Kota	13	Lokasi	115,000,000	DAU Murni	13	Lokasi	132,250,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	14 Kab/Kota	2	Unit	103,500,000	DAU Murni	2	Unit	119,025,000
3.28.03.1.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen terhadap Penerbitan Izin IUIPHHBK di Wil. Prov. Sulawesi Tengah	14 Kab/Kota	2	Unit	103,500,000	DAU Murni	2	Unit	119,025,000

			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	14 Kab/Kota	65	Unit	103,500,000	DAU Murni	65	Unit	119,025,000
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Termonitornya Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun	14 Kab/Kota	30	Unit	17,250,000	DAU Murni	30	Unit	19,837,500
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	14 Kab/Kota	35	Unit	86,250,000	DAU Murni	35	Unit	99,187,500
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	14 Kab/Kota	1	Unit	172,500,000	DAU Murni	1	Unit	198,375,000
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya penetapan pengadaan dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar	14 Kab/Kota	5	Dokumen	34,500,000	DAU Murni	5	Dokumen	39,675,000
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Tersedianya data sumber benih potensial	14 Kab/Kota	1	Unit	34,500,000	DAU Murni	1	Unit	39,675,000
3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Tersedianya jaminan mutu bibit tanaman hutan yang berkualitas	14 Kab/Kota	1	Unit	34,500,000	DAU Murni	1	Unit	39,675,000
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BINWASDAL Peredaran Benih dan/atau bibit di KPH	14 Kab/Kota	14	KPH/Tahura	69,000,000	DAU Murni	14	KPH/Tahura	79,350,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	14 Kab/Kota	70	%	253,000,000	DAU Murni	73	%	290,000,000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	14 Kab/Kota	3	Kali	20,000,000	DAU Murni	3	Kali	26,450,000
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran CITES	14 Kab/Kota	3	Kali	20,000,000	DAU Murni	3	Kali	26,450,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	14 Kab/Kota	1	Lokasi	92,000,000	DAU Murni	1	Lokasi	105,800,000
3.28.04.1.03.01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	14 Kab/Kota	1	Dokumen	23,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	26,450,000
3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terpeliharanya Ekosistem Karst	14 Kab/Kota	1	Kegiatan	46,000,000	DAU Murni	1	Kegiatan	52,900,000
3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	14 Kab/Kota	1	Dokumen	23,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	26,450,000
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terkendalinya Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	14 Kab/Kota	1	Kali	141,000,000	DAU Murni	1	Kali	157,750,000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya nilai efektifitas Pengelolaan Tahura (Data Spasial Kaw. Tahura)	14 Kab/Kota	70	%	46,000,000	DAU Murni	73	%	52,900,000
		Meningkatnya Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	14 Kab/Kota	1	Lokasi	23,000,000	DAU Murni	1	Lokasi	26,450,000
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	14 Kab/Kota	6	Desa	72,000,000	DAU Murni	6	Desa	78,400,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Fasilitas Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	14 Kab/Kota	1300	Ha	122,670,000	DAU Murni	1300	Ha	130,000,000

3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	14 Kab/Kota	1300	Ha	122,670,000	DAU Murni	1300	Ha	130,000,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kompetensi, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana tenaga penyuluh kehutanan	14 Kab/Kota	14	KPH	50,000,000	DAU Murni	14	KPH	50,000,000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	14 Kab/Kota	28	Kelompok	22,670,000	DAU Murni	28	Kelompok	30,000,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas fasilitasi Pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	14 Kab/Kota	1300	Ha	50,000,000	DAU Murni	1300	Ha	50,000,000
			14 Kab/Kota				DAU Murni			
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	14 Kab/Kota	100	%	66,545,000	DAU Murni	100	%	75,380,000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	14 Kab/Kota	1	Dokumen	66,545,000	DAU Murni	1	Dokumen	75,380,000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan DAS berbasis WEB	14 Kab/Kota	1	Paket	34,500,000	DAU Murni	0	Paket	39,675,000
		Tersedianya bibit penghijauan lingkungan sekitar wilayah DAS yang dibagikan kepada masyarakat	14 Kab/Kota	1000	Batang	-	DAU Murni	1000	Batang	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi DAS Bagi Pemegang IPPKH (26 IPPKH)	14 Kab/Kota	26	IPPKH	20,545,000	DAU Murni	26	IPPKH	22,480,000
		Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Kegiatan Pengelolaan DAS Bagi Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Sekitar DAS	14 Kab/Kota	26	IPPKH	-	DAU Murni	26	IPPKH	-
3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Rapat Forum DAS yang diselenggarakan dalam setahun	14 Kab/Kota	2	Kegiatan	11,500,000	DAU Murni	2	Kegiatan	13,225,000
	UPTD TAHURA		Kab. Sigi							
UPTD TAHURA						642,320,000	DAU Murni			703,725,000
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Sigi	100	%	362,640,000	DAU Murni	100	%	410,695,000
							DAU Murni			
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Sigi	100	%	88,925,000	DAU Murni	100	%	94,922,750
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	11,977,975	DAU Murni	1	Paket	13,775,000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sigi	1	Paket	10,500,000	DAU Murni	1	Paket	12,075,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	11,000,000	DAU Murni	1	Paket	12,650,000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	1	Paket	1,675,025	DAU Murni	1	Paket	2,650,750
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sigi	1	Paket	53,772,000	DAU Murni	1	Paket	53,772,000
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	100	%	111,275,000	DAU Murni	100	%	127,966,250
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	1	Paket	53,775,000	DAU Murni	1	Paket	61,841,250
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
			Kab. Sigi				DAU Murni			

3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Sigi	100 %	162,440,000	DAU Murni	100 %	187,806,000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	1 Paket	37,440,000	DAU Murni	1 Paket	43,056,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sigi	1 Paket	10,000,000	DAU Murni	1 Paket	12,500,000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	0 Paket	-	DAU Murni	0 Paket	-
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	1 Paket	115,000,000	DAU Murni	1 Paket	132,250,000
			Kab. Sigi			DAU Murni		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	2 Ha	279,680,000	DAU Murni	2 Ha	293,030,000
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Kab. Sigi	5,195 Ha	279,680,000	DAU Murni	5,195 Ha	293,030,000
		Nilai indeks efektivitas kawasan Tahura meningkat setiap tahun	Kab. Sigi	70 %		DAU Murni	73 %	
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Dokumen Perencanaan Pengelolaan TAHURA Provinsi yang tersusun	Kab. Sigi	1 Dokumen	23,000,000	DAU Murni	1 Dokumen	26,450,000
		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kawasan TAHURA Provinsi kepada Masyarakat sekitar	Kab. Sigi	8 Desa/Kel	10,844,500	DAU Murni	8 Desa/Kel	12,471,175
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Kab. Sigi	8 Desa/Kel	11,500,000	DAU Murni	8 Desa/Kel	13,225,000
3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Kunjungan wisata alam di TAHURA Provinsi bertambah	Kab. Sigi	6,000 Orang	20,000,000	DAU Murni	7,000 Orang	20,000,000
		Sarana dan Prasarana Wisata Alam di TAHURA Provinsi bertambah	Kab. Sigi	2 Unit	25,000,000	DAU Murni	2 Unit	22,000,000
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan di sekitar Kawasan TAHURA Provinsi	Kab. Sigi	8 Kelompok	10,695,000	DAU Murni	8 Kelompok	12,299,250
		Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di Kawasan TAHURA Provinsi	Kab. Sigi	16 Ha	178,640,500	DAU Murni	16 Ha	186,584,575
						DAU Murni		
						DAU Murni		
01.00	UPT KPH DAMPELAS TINOMBO		Kab. Donggala		1,492,882,408	DAU Murni		1,630,467,272
						DAU Murni		
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Donggala	100 %	647,100,033	DAU Murni	100 %	696,317,541
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Donggala	100 %	167,698,320	DAU Murni	100 %	207,247,900
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	1 Paket	75,000,000	DAU Murni	1 Paket	100,000,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Donggala	3 Paket	86,250,000	DAU Murni	3 Paket	99,187,500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Donggala	1 Paket	6,448,320	DAU Murni	1 Paket	8,060,400
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Donggala	0 Paket	-	DAU Murni	0 Paket	-
			Kab. Donggala			DAU Murni		
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Donggala	3 %	172,500,000	DAU Murni	3 %	198,375,000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Donggala	1 Paket	57,500,000	DAU Murni	1 Paket	66,125,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala	1 Paket	57,500,000	DAU Murni	1 Paket	66,125,000

3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Donggala	100	%	135,171,713	DAU Murni	100	%	168,964,641
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Donggala	1	Paket	53,757,650	DAU Murni	1	Paket	67,197,063
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	0	Paket	-	DAU Murni	0	Paket	-
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Donggala	1	Paket	81,414,063	DAU Murni	1	Paket	101,767,578
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Donggala	100	%	171,730,000	DAU Murni	100	%	121,730,000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Donggala	1	Paket	71,730,000	DAU Murni	1	Paket	71,730,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala	1	Paket	50,000,000	DAU Murni	1	Paket	50,000,000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	0	Paket	-	DAU Murni	0	Paket	-
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	1	Paket	50,000,000	DAU Murni	0	Paket	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	27	Ha	322,000,000	DAU Murni	28	Ha	345,800,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	-	Dokumen	393,782,375	DAU Murni	-	Dokumen	448,349,731
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Donggala	-	Dokumen	166,750,000	DAU Murni	-	Dokumen	191,762,500
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Donggala	50	Km	46,000,000	DAU Murni	50	Km	52,900,000
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	200	Ha	86,250,000	DAU Murni	200	Ha	99,187,500
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Donggala	2	Dokumen	34,500,000	DAU Murni	2	Dokumen	39,675,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	-	Dokumen	30,000,000	DAU Murni	-	Dokumen	30,000,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Donggala	2	Dokumen	30,000,000	DAU Murni	2	Dokumen	30,000,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	2	Unit	18,400,000	DAU Murni	2	Unit	21,160,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	1	Unit	6,900,000	DAU Murni	1	Unit	7,935,000
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	1	Unit	11,500,000	DAU Murni	1	Unit	13,225,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			

3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	27	Ha	322,000,000	DAU Murni	28	Ha	345,800,000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Donggala	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Donggala	27	Ha	230,000,000	DAU Murni	28	Ha	240,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	2	Kelompok	34,500,000	DAU Murni	2	Kelompok	39,675,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Donggala	20,000	Batang	57,500,000	DAU Murni	20,000	Batang	66,125,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Donggala	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Donggala	12	Kali	91,232,375	DAU Murni	12	Kali	104,917,231
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Donggala	12	Kali	31,020,215	DAU Murni	12	Kali	35,673,247
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Donggala	1	Dokumen	19,486,750	DAU Murni	1	Dokumen	22,409,763
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Donggala	5	Orang	40,725,410	DAU Murni	5	Orang	46,834,222
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Donggala	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Donggala	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Donggala	-	Unit	77,050,000	DAU Murni	-	Unit	88,607,500
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Donggala	2	Kelompok	46,000,000	DAU Murni	2	Kelompok	52,900,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Donggala	9	Unit	31,050,000	DAU Murni	9	Unit	35,707,500
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Donggala	-	Unit	10,350,000	DAU Murni	-	Unit	11,902,500

3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Donggala	3 Unit	10,350,000	DAU Murni		3 Unit	11,902,500
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Donggala	- Unit	-	DAU Murni		- Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Donggala	- Kali	-	DAU Murni		- Kali	-
			Kab. Donggala			DAU Murni			
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Donggala	- %	-	DAU Murni		- %	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Donggala	- Lokasi	-	DAU Murni		- Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Donggala	- Kali	-	DAU Murni		- Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Donggala	- Kelompok	-	DAU Murni		- Kelompok	-
			Kab. Donggala			DAU Murni			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	100 Ha	130,000,000	DAU Murni		100 Ha	140,000,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	- Kelompok	130,000,000	DAU Murni		- Kelompok	140,000,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Donggala	- Orang	-	DAU Murni		- Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitas penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	3 Kelompok	30,000,000	DAU Murni		3 Kelompok	30,000,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitas pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	100 Ha	100,000,000	DAU Murni		100 Ha	110,000,000
			Kab. Donggala			DAU Murni			
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Donggala	1 Kegiatan	-	DAU Murni		1 Kegiatan	-
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kab. Donggala	1 Kegiatan	-	DAU Murni		1 Kegiatan	-
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitas dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Donggala	- Kegiatan	-	DAU Murni		- Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Donggala	1 Kegiatan	-	DAU Murni		1 Kegiatan	-
01.00	UPT KPH DOLAGO TANGGUNUNG		Kab. Parimo		1,801,521,916	DAU Murni			1,740,443,954

3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Parimo	100	%	669,067,002	DAU Murni	100	%	524,927,052
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Parimo	100	%	54,022,340	DAU Murni	100	%	62,125,691
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Parimo	1	Paket	3,314,185	DAU Murni	1	Paket	3,811,313
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Parimo	2	Paket	15,321,692	DAU Murni	2	Paket	17,619,945
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Parimo	1	Paket	6,608,863	DAU Murni	1	Paket	7,600,193
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Parimo	1	Paket	28,777,600	DAU Murni	1	Paket	33,094,240
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Parimo	1	%	230,000,000	DAU Murni	1	%	20,000,000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Parimo		Paket		DAU Murni	1	Paket	20,000,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Parimo		Paket		DAU Murni		Paket	
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Parimo	1	Paket	230,000,000	DAU Murni		Paket	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Parimo	100	%	202,793,237	DAU Murni	100	%	233,212,223
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Parimo	1	Paket	78,689,837	DAU Murni	1	Paket	90,493,313
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Parimo		Paket		DAU Murni		Paket	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Parimo	1	Paket	124,103,400	DAU Murni	1	Paket	142,718,910
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Parimo	100	%	182,251,425	DAU Murni	100	%	209,589,139
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Parimo	1	Paket	109,714,600	DAU Murni	1	Paket	126,171,790
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Parimo	1	Paket	15,036,825	DAU Murni	1	Paket	17,292,349
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Parimo	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Parimo		Paket		DAU Murni		Paket	
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Parimo	27	Ha	462,500,000	DAU Murni	28	Ha	481,125,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Parimo	-	Dokumen	519,704,914	DAU Murni	-	Dokumen	574,391,902
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Parimo	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Parimo				DAU Murni			
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Parimo		Ha		DAU Murni		Ha	
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Parimo				DAU Murni			
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Parimo	-	Dokumen	57,500,000	DAU Murni	-	Dokumen	66,125,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Parimo	3	Dokumen	57,500,000	DAU Murni	3	Dokumen	66,125,000
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Parimo	-	Unit	115,000,000	DAU Murni	25	Unit	132,250,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Parimo	3	Unit	57,500,000	DAU Murni	3	Unit	66,125,000
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Parimo	3	Unit	57,500,000	DAU Murni	3	Unit	66,125,000

			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Parimo	27	Ha	462,500,000	DAU Murni	28	Ha	481,125,000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Parimo	1	Dokumen	75,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	75,000,000
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Parimo	27	Ha	230,000,000	DAU Murni	28	Ha	240,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Parimo	2	Kelompok	100,000,000	DAU Murni	2	Kelompok	100,000,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Parimo	20,000	Batang	57,500,000	DAU Murni	20,000	Batang	66,125,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Parimo	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Parimo	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Parimo	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Parimo	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Parimo	10	Kali	281,823,806	DAU Murni	10	Kali	300,828,627
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Parimo	10	Kali	126,698,806	DAU Murni	10	Kali	145,703,627
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Parimo	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Parimo	5	Orang	155,125,000	DAU Murni	5	Orang	155,125,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Parimo	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Parimo	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Parimo	-	Unit	57,500,000	DAU Murni	-	Unit	66,125,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan unit usaha pengelolaan HHBK	Kab. Parimo	3	Kelompok	57,500,000	DAU Murni	3	Kelompok	66,125,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Parimo	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
			Kab. Parimo				DAU Murni			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Parimo	-	Unit	7,881,108	DAU Murni	-	Unit	9,063,274

3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Parimo	3 Unit	7,881,108	DAU Murni		3 Unit	9,063,274
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Parimo	- Unit	-	DAU Murni		- Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Parimo	- Kali	-	DAU Murni		- Kali	-
			Kab. Parimo			DAU Murni			
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Parimo	- %	-	DAU Murni		- %	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Parimo	- Lokasi	-	DAU Murni		- Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Parimo	- Kali	-	DAU Murni		- Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Parimo	- Kelompok	-	DAU Murni		- Kelompok	-
			Kab. Parimo			DAU Murni			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Parimo	100 Ha	130,250,000	DAU Murni		100 Ha	140,000,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Parimo	- Kelompok	130,250,000	DAU Murni		- Kelompok	140,000,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Parimo	- Orang	-	DAU Murni		- Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Parimo	3 Kelompok	30,250,000	DAU Murni		3 Kelompok	30,000,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Parimo	100 Ha	100,000,000	DAU Murni		100 Ha	110,000,000
			Kab. Parimo			DAU Murni			
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Parimo	1 Kegiatan	20,000,000	DAU Murni		1 Kegiatan	20,000,000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Parimo	1 Kegiatan	20,000,000	DAU Murni		1 Kegiatan	20,000,000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Parimo	- Kegiatan	-	DAU Murni		- Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Parimo	1 Kegiatan	20,000,000	DAU Murni		1 Kegiatan	20,000,000
						DAU Murni			
						DAU Murni			
	UPT KPH TOILI BATURUBE		Kab. Banggai			DAU Murni			
	KPH TOILI BATURUBE				1,876,640,279	DAU Murni			1,948,636,321
						DAU Murni			
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Banggai	100 %	741,140,279	DAU Murni		100 %	852,311,321
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Banggai	100 %	163,823,029	DAU Murni		100 %	188,396,484

3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banggai	1	Paket	69,695,529	DAU Murni	1	Paket	80,149,859
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Banggai	1	Paket	18,515,000	DAU Murni	1	Paket	21,292,250
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banggai	1	Paket	6,612,500	DAU Murni	1	Paket	7,604,375
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banggai	1	Paket	69,000,000	DAU Murni	1	Paket	79,350,000
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Banggai	3	%	160,425,000	DAU Murni	3	%	184,488,750
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Banggai	1	Paket	34,500,000	DAU Murni	1	Paket	39,675,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banggai	1	Paket	39,675,000	DAU Murni	1	Paket	45,626,250
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banggai	1	Paket	86,250,000	DAU Murni	1	Paket	99,187,500
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banggai	100	%	164,381,000	DAU Murni	100	%	189,038,150
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banggai	1	Paket	20,631,000	DAU Murni	1	Paket	23,725,650
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banggai	1	Paket	28,750,000	DAU Murni	1	Paket	33,062,500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banggai	1	Paket	115,000,000	DAU Murni	1	Paket	132,250,000
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banggai	100	%	252,511,250	DAU Murni	100	%	290,387,938
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banggai	1	Paket	80,011,250	DAU Murni	1	Paket	92,012,938
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banggai	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banggai	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banggai	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Banggai	27	Ha	342,700,000	DAU Murni	28	Ha	369,605,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	2	Dokumen	662,300,000	DAU Murni	1	Dokumen	581,645,000
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Banggai	-	Dokumen	49,593,750	DAU Murni	-	Dokumen	57,032,813
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Banggai	-	Km	49,593,750	DAU Murni	-	Km	57,032,813
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Banggai	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Banggai	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	2	Dokumen	200,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	50,000,000

3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Banggai	2	Dokumen	200,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	50,000,000
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Banggai	-	Unit	107,956,250	DAU Murni	25	Unit	124,149,688
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Banggai	2	Unit	49,593,750	DAU Murni	2	Unit	57,032,813
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Banggai	5	Unit	58,362,500	DAU Murni	5	Unit	67,116,875
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Banggai	27	Ha	342,700,000	DAU Murni	28	Ha	369,605,000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Banggai	1	Dokumen	28,750,000	DAU Murni	1	Dokumen	33,062,500
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Banggai	27	Ha	230,000,000	DAU Murni	28	Ha	240,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Banggai	2	Kelompok	26,450,000	DAU Murni	2	Kelompok	30,417,500
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Banggai	20,000	Batang	57,500,000	DAU Murni	20,000	Batang	66,125,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Banggai	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Banggai	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Banggai	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Banggai	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Banggai				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Banggai	16	Kali	178,250,000	DAU Murni	16	Kali	204,987,500
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Banggai	16	Kali	40,250,000	DAU Murni	16	Kali	46,287,500
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Banggai	6	Dokumen	69,000,000	DAU Murni	6	Dokumen	79,350,000
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Banggai	5	Orang	69,000,000	DAU Murni	5	Orang	79,350,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Banggai	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Banggai	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-

			Kab. Banggai				DAU Murni				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Banggai	-	Unit	69,000,000	DAU Murni		-	Unit	79,350,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitas Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Banggai	6	Kelompok	69,000,000	DAU Murni		6	Kelompok	79,350,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Banggai	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
			Kab. Banggai				DAU Murni				
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Banggai	-	Unit	57,500,000	DAU Murni		-	Unit	66,125,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Banggai	10	Unit	57,500,000	DAU Murni		10	Unit	66,125,000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Banggai	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Banggai	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
			Kab. Banggai				DAU Murni				
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Banggai	-	%	-	DAU Murni		-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Banggai	-	Lokasi	-	DAU Murni		-	Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Banggai	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Banggai	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
			Kab. Banggai				DAU Murni				
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Banggai	100	Ha	130,500,000	DAU Murni		100	Ha	145,075,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Banggai	-	Kelompok	130,500,000	DAU Murni		-	Kelompok	145,075,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Banggai	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitas penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Banggai	10	Kelompok	30,500,000	DAU Murni		10	Kelompok	35,075,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitas pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Banggai	100	Ha	100,000,000	DAU Murni		100	Ha	110,000,000
			Kab. Banggai				DAU Murni				
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Banggai	2	Kegiatan	-	DAU Murni		2	Kegiatan	-

3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Banggai	2	Kegiatan	-	DAU Murni	2	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Banggai	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Banggai	2	Kegiatan	-	DAU Murni	2	Kegiatan	-
							DAU Murni			
							DAU Murni			
							DAU Murni			
01.00	UPT KPH BANAWA LALUNDU		Kab. Donggala			1,707,643,288	DAU Murni			1,910,126,566
							DAU Murni			
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Donggala	100	%	794,209,600	DAU Murni	100	%	877,686,500
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Donggala	100	%	353,541,600	DAU Murni	100	%	406,570,500
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala	1	Paket	204,773,000	DAU Murni	1	Paket	235,488,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Donggala	1	Paket	111,550,000	DAU Murni	1	Paket	128,282,500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Donggala	1	Paket	37,218,600	DAU Murni	1	Paket	42,800,000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Donggala				DAU Murni			
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Donggala	-	%	-	DAU Murni	-	%	-
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Donggala	100	%	257,680,000	DAU Murni	100	%	260,680,000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Donggala	1	Paket	32,000,000	DAU Murni	1	Paket	35,000,000
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Donggala	1	Paket	225,680,000	DAU Murni	1	Paket	225,680,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Donggala	100	%	182,988,000	DAU Murni	100	%	210,436,000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Donggala	1	Paket	90,988,000	DAU Murni	1	Paket	104,636,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Donggala		Paket		DAU Murni		Paket	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Donggala		Paket		DAU Murni		Paket	
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Donggala	1	Paket	92,000,000	DAU Murni	1	Paket	105,800,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	27	Ha	600,714,500	DAU Murni	28	Ha	677,813,125

		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	-	Dokumen	182,719,188	DAU Murni	-	Dokumen	210,126,941
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Donggala	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Donggala	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Donggala	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	-	Dokumen	23,000,000	DAU Murni	-	Dokumen	26,450,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Donggala	1	Dokumen	23,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	26,450,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	-	Unit	18,400,000	DAU Murni	25	Unit	21,160,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
		Fasilitas Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Donggala	2	Unit	18,400,000	DAU Murni	2	Unit	21,160,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	27	Ha	600,714,500	DAU Murni	28	Ha	677,813,125
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Donggala	1	Dokumen	19,837,500	DAU Murni	1	Dokumen	22,813,125
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Donggala	27	Ha	230,000,000	DAU Murni	28	Ha	240,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Donggala	22000	Batang	350,877,000	DAU Murni	24000	Batang	415,000,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Donggala	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Donggala	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			

3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Donggala	12	Kali	22,581,688	DAU Murni	12	Kali	25,968,941
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Donggala	12	Kali	22,581,688	DAU Murni	12	Kali	25,968,941
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Donggala	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Donggala	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Donggala	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Donggala	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Donggala	-	Unit	85,675,000	DAU Murni	-	Unit	98,526,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Donggala	5	Ha	46,000,000	DAU Murni	5	Ha	52,900,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Donggala	6	Unit	39,675,000	DAU Murni	6	Unit	45,626,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Donggala	-	Unit	33,062,500	DAU Murni	-	Unit	38,022,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Donggala	8	Unit	33,062,500	DAU Murni	8	Unit	38,022,000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Donggala	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Donggala	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Donggala	-	%	-	DAU Murni	-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Donggala	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Donggala	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Donggala	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	100	Ha	130,000,000	DAU Murni	100	Ha	144,500,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	-	Kelompok	130,000,000	DAU Murni	-	Kelompok	144,500,000

3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Donggala	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	2	Kelompok	30,000,000	DAU Murni	2	Kelompok	34,500,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengurusan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Donggala	100	Ha	100,000,000	DAU Murni	100	Ha	110,000,000
			Kab. Donggala				DAU Murni			
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Donggala	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Donggala	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Donggala	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Donggala	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
							DAU Murni			
							DAU Murni			
							DAU Murni			
01.00	UPT KPH KULAWI		Kab. Sigi			1,030,989,772	DAU Murni			1,128,638,238
							DAU Murni			
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Sigi	100	%	220,989,772	DAU Murni	100	%	254,138,238
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Sigi	100	%	80,363,575	DAU Murni	100	%	92,418,111
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	42,846,399	DAU Murni	1	Paket	49,273,358
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	27,672,255	DAU Murni	1	Paket	31,823,093
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	1	Paket	9,844,921	DAU Murni	1	Paket	11,321,660
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Sigi	100	%	-	DAU Murni	100	%	-
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	100	%	73,921,612	DAU Murni	100	%	85,009,854
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	1	Paket	16,421,612	DAU Murni	1	Paket	18,884,854
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sigi	100	%	66,704,586	DAU Murni	100	%	76,710,273
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	1	Paket	66,704,586	DAU Murni	1	Paket	76,710,273
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-

3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Sigi	17	Ha	410,000,000	DAU Murni	20	Ha	400,000,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	-	Dokumen	240,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	300,000,000
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Sigi	-	Dokumen	40,000,000	DAU Murni	-	Dokumen	50,000,000
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Sigi	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Sigi	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Sigi	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	1	Dokumen	-	DAU Murni	1	Dokumen	-
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Sigi	1	Dokumen	-	DAU Murni	1	Dokumen	-
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Sigi	4	Unit	40,000,000	DAU Murni	4	Unit	50,000,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Sigi	4	Unit		DAU Murni	4	Unit	
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Sigi	4	Unit		DAU Murni	4	Unit	
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Sigi	17	Ha	410,000,000	DAU Murni	20	Ha	400,000,000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Sigi	1	Dokumen		DAU Murni	1	Dokumen	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Sigi	17	Ha		DAU Murni	20	Ha	
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Sigi	10	Kelompok		DAU Murni	10	Kelompok	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Sigi	15,000	Batang		DAU Murni	15,000	Batang	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Sigi	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Sigi	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Sigi	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Sigi	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Sigi				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Sigi	12	Kali	60,000,000	DAU Murni	12	Kali	70,000,000

3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Sigi	12	Kali		DAU Murni		12	Kali	
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Sigi	1	Dokumen	-	DAU Murni		1	Dokumen	-
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Sigi	2	Orang	-	DAU Murni		2	Orang	-
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Sigi	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Sigi	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
			Kab. Sigi				DAU Murni				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Sigi	1	Unit	40,000,000	DAU Murni		1	Unit	50,000,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Sigi	1	Kelompok	-	DAU Murni		1	Kelompok	-
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Sigi	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
			Kab. Sigi				DAU Murni				
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Sigi	0	Unit	40,000,000	DAU Murni		0	Unit	50,000,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Sigi	0	Unit	-	DAU Murni		0	Unit	-
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Sigi	-	Unit	20,000,000	DAU Murni		-	Unit	30,000,000
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Sigi	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
			Kab. Sigi				DAU Murni				
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Sigi	-	%	-	DAU Murni		-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Sigi	-	Lokasi	-	DAU Murni		-	Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Sigi	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Sigi	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
			Kab. Sigi				DAU Murni				
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Sigi	100	Ha	130,000,000	DAU Murni		100	Ha	140,000,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Sigi	4	Kelompok	130,000,000	DAU Murni		4	Kelompok	140,000,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Sigi	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-

3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Sigi	5	Kelompok	30000000	DAU Murni	5	Kelompok	30000000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengurusan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Sigi	100	Ha	100,000,000	DAU Murni	100	Ha	110,000,000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Sigi	1	Kegiatan	30,000,000	DAU Murni	1	Kegiatan	34,500,000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Sigi	1	Kegiatan	-	DAU Murni	1	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Sigi	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Sigi	1	Kegiatan	-	DAU Murni	1	Kegiatan	-
							DAU Murni			
							DAU Murni			
01.00	UPT KPH SINTUWU MAROSO		Kab. Poso			1,509,251,750	DAU Murni			1,666,480,513
							DAU Murni			
							DAU Murni			
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Poso	100	%	692,985,250	DAU Murni	100	%	797,024,038
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Poso	100	%	115,431,250	DAU Murni	100	%	132,745,938
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Poso	1	Paket	46,000,000	DAU Murni	1	Paket	52,900,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Poso	1	Paket	26,450,000	DAU Murni	1	Paket	30,417,500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Poso	1	Paket	9,918,750	DAU Murni	1	Paket	11,406,563
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Poso	1	Paket	33,062,500	DAU Murni	1	Paket	38,021,875
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Poso	3	%	177,963,500	DAU Murni	3	%	204,749,025
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Poso	1	Paket	46,287,500	DAU Murni	1	Paket	53,230,625
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Poso	1	Paket	39,676,000	DAU Murni	1	Paket	45,718,400
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Poso	1	Paket	92,000,000	DAU Murni	1	Paket	105,800,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Poso	100	%	242,328,000	DAU Murni	100	%	278,677,200
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Poso	1	Paket	69,828,000	DAU Murni	1	Paket	80,302,200
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Poso	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Poso	1	Paket	115,000,000	DAU Murni	1	Paket	132,250,000
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Poso	100	%	157,262,500	DAU Murni	100	%	180,851,875
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Poso	1	Paket	13,225,000	DAU Murni	1	Paket	15,208,750
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Poso	1	Paket	51,750,000	DAU Murni	1	Paket	59,512,500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Poso	1	Paket	46,287,500	DAU Murni	1	Paket	53,230,625
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Poso	1	Paket	46,000,000	DAU Murni	1	Paket	52,900,000
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Poso	17	Ha	255,637,500	DAU Murni	20	Ha	304,483,125

		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Poso	-	Dokumen	422,004,000	DAU Murni	-	Dokumen	409,260,850
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Poso	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Poso	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Poso	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Poso	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Poso	-	Dokumen	132,250,000	DAU Murni	-	Dokumen	76,043,750
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Poso	2	Dokumen	132,250,000	DAU Murni	1	Dokumen	76,043,750
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Poso	-	Unit	46,287,500	DAU Murni	25	Unit	53,230,625
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Poso	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
		Fasilitas Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Poso	2	Unit	46,287,500	DAU Murni	2	Unit	53,230,625
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Poso	17	Ha	255,637,500	DAU Murni	20	Ha	304,483,125
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Poso	1	Dokumen	19,837,500	DAU Murni	1	Dokumen	22,813,125
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Poso	17	Ha	130,000,000	DAU Murni	20	Ha	160,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Poso	3	Kelompok	33,062,500	DAU Murni	3	Kelompok	38,021,875
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Poso	22,000	Batang	72,737,500	DAU Murni	22,000	Batang	83,648,125
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Poso	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Poso	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Poso	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Poso	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Poso				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Poso	12	Kali	110,929,000	DAU Murni	12	Kali	127,568,350
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Poso	12	Kali	57,500,000	DAU Murni	12	Kali	66,125,000

		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Poso	2	Dokumen	26,450,000	DAU Murni		2	Dokumen	30,417,500
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Poso	6	Orang	26,979,000	DAU Murni		6	Orang	31,025,850
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Poso	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Poso	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
			Kab. Poso				DAU Murni				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Poso	-	Unit	86,250,000	DAU Murni		-	Unit	99,187,500
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitas Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Poso	10	Ha	46,000,000	DAU Murni		10	Ha	52,900,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Poso	10	Unit	40,250,000	DAU Murni		10	Unit	46,287,500
			Kab. Poso				DAU Murni				
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Poso	-	Unit	46,287,500	DAU Murni		-	Unit	53,230,625
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Poso	7	Unit	46,287,500	DAU Murni		7	Unit	53,230,625
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Poso	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Poso	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
			Kab. Poso				DAU Murni				
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Poso	-	%	-	DAU Murni		-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Poso	-	Lokasi	-	DAU Murni		-	Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Poso	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Poso	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
			Kab. Poso				DAU Murni				
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Poso	100	Ha	130,000,000	DAU Murni		100	Ha	144,500,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Poso	-	Kelompok	130,000,000	DAU Murni		-	Kelompok	144,500,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Poso	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-

3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Poso	2	Kelompok	30,000,000	DAU Murni	2	Kelompok	34,500,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Poso	100	Ha	100,000,000	DAU Murni	100	Ha	110,000,000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Poso	1	Kegiatan	8,625,000	DAU Murni	1	Kegiatan	11,212,500
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Poso	1	Kegiatan	8,625,000	DAU Murni	1	Kegiatan	11,212,500
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Poso	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Poso	1	Kegiatan	8,625,000	DAU Murni	1	Kegiatan	11,212,500
01.00	UPT KPH SIVIA PATUJU		Kab. Tojo UnaUna			1,539,041,500	DAU Murni			1,775,397,725
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Tojo UnaUna	100	%	741,244,000	DAU Murni	100	%	852,430,600
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tojo UnaUna	100	%	106,375,000	DAU Murni	100	%	122,331,250
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	17,250,000	DAU Murni	1	Paket	19,837,500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	11,500,000	DAU Murni	1	Paket	13,225,000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	20,125,000	DAU Murni	1	Paket	23,143,750
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Tojo UnaUna	3	%	200,962,500	DAU Murni	3	%	231,106,875
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	46,287,500	DAU Murni	1	Paket	53,230,625
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	39,675,000	DAU Murni	1	Paket	45,626,250
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	115,000,000	DAU Murni	1	Paket	132,250,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tojo UnaUna	100	%	238,406,500	DAU Murni	100	%	274,167,475
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	69,828,000	DAU Murni	1	Paket	80,302,200
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	88,078,500	DAU Murni	1	Paket	101,290,275
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	80,500,000	DAU Murni	1	Paket	92,575,000
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo UnaUna	100	%	195,500,000	DAU Murni	100	%	224,825,000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	51,750,000	DAU Murni	1	Paket	59,512,500

3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	28,750,000	DAU Murni	1	Paket	33,062,500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tojo UnaUna	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Tojo UnaUna	17	Ha	261,962,500	DAU Murni	20	Ha	311,756,875
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Tojo UnaUna	-	Dokumen	405,835,000	DAU Murni	-	Dokumen	466,710,250
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Tojo UnaUna	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tojo UnaUna	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Tojo UnaUna	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Tojo UnaUna	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Review Dokumen RPHJP	Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
		Penyusunan Dokumen RPHJPD	Kab. Tojo UnaUna	2	Dokumen	34,500,000	DAU Murni	2	Dokumen	39,675,000
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tojo UnaUna	-	Unit	11,500,000	DAU Murni	25	Unit	13,225,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tojo UnaUna	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
		Fasilitas Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tojo UnaUna	2	Unit	11,500,000	DAU Murni	2	Unit	13,225,000
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Tojo UnaUna	17	Ha	261,962,500	DAU Murni	20	Ha	311,756,875
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Tojo UnaUna	1	Dokumen	19,837,500	DAU Murni	1	Dokumen	22,813,125
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Tojo UnaUna	17	Ha	130,000,000	DAU Murni	20	Ha	160,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tojo UnaUna	5	Kelompok	54,625,000	DAU Murni	5	Kelompok	62,818,750
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Tojo UnaUna	20,000	Batang	57,500,000	DAU Murni	20,000	Batang	66,125,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Tojo UnaUna	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-

3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tojo UnaUna	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tojo UnaUna	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tojo UnaUna	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	12	Kali	123,510,000	DAU Murni	12	Kali	142,036,500
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Tojo UnaUna	12	Kali	57,500,000	DAU Murni	12	Kali	66,125,000
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Tojo UnaUna	2	Dokumen	28,750,000	DAU Murni	2	Dokumen	33,062,500
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	6	Orang	37,260,000	DAU Murni	6	Orang	42,849,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Tojo UnaUna	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Tojo UnaUna	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Tojo UnaUna	-	Unit	247,825,000	DAU Murni	-	Unit	284,998,750
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Tojo UnaUna	10	Ha	181,700,000	DAU Murni	10	Ha	208,955,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Tojo UnaUna	5	Unit	66,125,000	DAU Murni	5	Unit	76,043,750
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Tojo UnaUna	-	Unit	23,000,000	DAU Murni	-	Unit	26,450,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Tojo UnaUna	2	Unit	23,000,000	DAU Murni	2	Unit	26,450,000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Tojo UnaUna	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Tojo UnaUna	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Tojo UnaUna	-	%	-	DAU Murni	-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Tojo UnaUna	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-

3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Tojo UnaUna	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Tojo UnaUna	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Tojo UnaUna	100	Ha	130,000,000	DAU Murni	100	Ha	144,500,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Tojo UnaUna	-	Kelompok	130,000,000	DAU Murni	-	Kelompok	144,500,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Tojo UnaUna	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Tojo UnaUna	3	Kelompok	30,000,000	DAU Murni	3	Kelompok	34,500,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Tojo UnaUna	100	Ha	100,000,000	DAU Murni	100	Ha	110,000,000
			Kab. Tojo UnaUna				DAU Murni			
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Tojo UnaUna	1	Kegiatan	-	DAU Murni	1	Kegiatan	-
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Tojo UnaUna	1	Kegiatan	-	DAU Murni	1	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Tojo UnaUna	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Tojo UnaUna	1	Kegiatan	-	DAU Murni	1	Kegiatan	-
01.00	UPT KPH BALANTAK		Kab. Bangkep			1,712,806,827	DAU Murni			1,935,415,101
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Bangkep	100	%	768,721,827	DAU Murni	100	%	884,030,101
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Bangkep	100	%	143,750,000	DAU Murni	100	%	165,312,500
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkep	1	Paket	34,500,000	DAU Murni	1	Paket	39,675,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangkep	1	Paket	46,000,000	DAU Murni	1	Paket	52,900,000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangkep	1	Paket	5,750,000	DAU Murni	1	Paket	6,612,500
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkep	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Bangkep	100	%	189,750,000	DAU Murni	100	%	218,212,500
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Bangkep	1	Paket	23,000,000	DAU Murni	1	Paket	26,450,000

3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkep	1	Paket	80,500,000	DAU Murni	1	Paket	92,575,000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkep	1	Paket	86,250,000	DAU Murni	1	Paket	99,187,500
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkep	100	%	129,896,617	DAU Murni	100	%	149,381,110
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkep	1	Paket	42,279,267	DAU Murni	1	Paket	48,621,157
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkep	1	Paket	23,000,000	DAU Murni	1	Paket	26,450,000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkep	1	Paket	64,617,350	DAU Murni	1	Paket	74,309,953
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkep	100	%	305,325,210	DAU Murni	100	%	351,123,992
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangkep	1	Paket	104,075,210	DAU Murni	1	Paket	119,686,492
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkep	1	Paket	86,250,000	DAU Murni	1	Paket	99,187,500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangkep	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkep	1	Paket	57,500,000	DAU Murni	1	Paket	66,125,000
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Bangkep	27	Ha	431,250,000	DAU Murni	28	Ha	471,437,500
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Bangkep	-	Dokumen	350,750,000	DAU Murni	-	Dokumen	403,362,500
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Bangkep	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Bangkep	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Bangkep	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Bangkep	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Bangkep	-	Dokumen	57,500,000	DAU Murni	-	Dokumen	66,125,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Bangkep	2	Dokumen	57,500,000	DAU Murni	2	Dokumen	66,125,000
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Bangkep	-	Unit	57,500,000	DAU Murni	25	Unit	66,125,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Bangkep	8	Unit	28,750,000	DAU Murni	8	Unit	33,062,500
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Bangkep	8	Unit	28,750,000	DAU Murni	8	Unit	33,062,500

			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Bangkep	27	Ha	431,250,000	DAU Murni	28	Ha	471,437,500
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Bangkep	1	Dokumen	86,250,000	DAU Murni	1	Dokumen	99,187,500
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Bangkep	27	Ha	230,000,000	DAU Murni	28	Ha	240,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bangkep	3	Kelompok	57,500,000	DAU Murni	3	Kelompok	66,125,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Bangkep	20,000	Batang	57,500,000	DAU Murni	20,000	Batang	66,125,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Bangkep	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Bangkep	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Bangkep	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bangkep	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Bangkep	12	Kali	149,500,000	DAU Murni	12	Kali	171,925,000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Bangkep	12	Kali	57,500,000	DAU Murni	12	Kali	66,125,000
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Bangkep	4	Dokumen	34,500,000	DAU Murni	4	Dokumen	39,675,000
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Bangkep	4	Orang	57,500,000	DAU Murni	4	Orang	66,125,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Bangkep	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Bangkep	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Bangkep	-	Unit	57,500,000	DAU Murni	-	Unit	66,125,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan Budidaya dan unit usaha pengelola HHBK	Kab. Bangkep	4	Kelompok	57,500,000	DAU Murni	4	Kelompok	66,125,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Bangkep	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
			Kab. Bangkep				DAU Murni			

3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Bangkep	-	Unit	28,750,000	DAU Murni	-	Unit	33,062,500
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Bangkep	14	Unit	28,750,000	DAU Murni	14	Unit	33,062,500
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Bangkep	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Bangkep	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Bangkep	-	%	-	DAU Murni	-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Bangkep	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Bangkep	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Bangkep	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Bangkep	100	Ha	130,000,000	DAU Murni	100	Ha	144,500,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Bangkep	-	Kelompok	130,000,000	DAU Murni	-	Kelompok	144,500,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Bangkep	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Bangkep	3	Kelompok	30,000,000	DAU Murni	3	Kelompok	34,500,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Bangkep	100	Ha	100,000,000	DAU Murni	100	Ha	110,000,000
			Kab. Bangkep				DAU Murni			
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Bangkep	1	Kegiatan	32,085,000	DAU Murni	1	Kegiatan	32,085,000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Bangkep	1	Kegiatan	32,085,000	DAU Murni	1	Kegiatan	32,085,000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Bangkep	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Bangkep	1	Kegiatan	32,085,000	DAU Murni	1	Kegiatan	32,085,000
01.00	UPT KPH PULAU PELING		Kab. Balut			1,404,437,619	DAU Murni			1,578,878,262
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Balut	100	%	806,078,660	DAU Murni	100	%	926,990,459

3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Balut	100 %	98,333,992	DAU Murni	100 %	113,084,090
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balut	1 Paket	9,429,425	DAU Murni	1 Paket	10,843,839
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Balut	1 Paket	23,409,771	DAU Murni	1 Paket	26,921,237
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balut	1 Paket	5,347,496	DAU Murni	1 Paket	6,149,620
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balut	1 Paket	60,147,300	DAU Murni	1 Paket	69,169,395
			Kab. Balut			DAU Murni		
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Balut	3 %	241,881,836	DAU Murni	3 %	278,164,111
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Balut	1 Paket	11,881,836	DAU Murni	1 Paket	13,664,111
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Balut	1 Paket	115,000,000	DAU Murni	1 Paket	132,250,000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balut	1 Paket	115,000,000	DAU Murni	1 Paket	132,250,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balut	100 %	262,576,351	DAU Murni	100 %	301,962,804
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balut	1 Paket	35,317,951	DAU Murni	1 Paket	40,615,644
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balut	1 Paket	60,173,750	DAU Murni	1 Paket	69,199,813
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balut	1 Paket	167,084,650	DAU Murni	1 Paket	192,147,348
			Kab. Balut			DAU Murni		
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balut	100 %	203,286,481	DAU Murni	100 %	233,779,454
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Balut	1 Paket	30,786,481	DAU Murni	1 Paket	35,404,454
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Balut	1 Paket	57,500,000	DAU Murni	1 Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balut	1 Paket	57,500,000	DAU Murni	1 Paket	66,125,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balut	1 Paket	57,500,000	DAU Murni	1 Paket	66,125,000
			Kab. Balut			DAU Murni		
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Balut	11 Ha	172,751,452	DAU Murni	14 Ha	178,664,170
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Balut	- Dokumen	295,607,507	DAU Murni	- Dokumen	339,948,633
			Kab. Balut					
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Balut	- Dokumen	26,606,055	DAU Murni	- Dokumen	30,596,963
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Balut	- Km	26,606,055	DAU Murni	- Km	30,596,963
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Balut	- Ha	-	DAU Murni	- Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Balut	- Dokumen	-	DAU Murni	- Dokumen	-
			Kab. Balut			DAU Murni		
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Balut	- Dokumen	57,500,000	DAU Murni	- Dokumen	66,125,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Balut	2 Dokumen	57,500,000	DAU Murni	1 Dokumen	66,125,000
			Kab. Balut			DAU Murni		
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Balut	4 Unit	34,500,000	DAU Murni	4 Unit	39,675,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Balut	2 Unit	17,250,000	DAU Murni	2 Unit	19,837,500
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Balut	2 Unit	17,250,000	DAU Murni	2 Unit	19,837,500
			Kab. Balut			DAU Murni		

3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Balut	11	Ha	172,751,452	DAU Murni		14	Ha	178,664,170
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Balut	-	Dokumen	-	DAU Murni		-	Dokumen	-
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Balut	11	Ha	105,000,000	DAU Murni		14	Ha	100,750,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Balut	2	Kelompok	23,000,000	DAU Murni		2	Kelompok	26,450,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Balut	20,000	Batang	44,751,452	DAU Murni		20,000	Batang	51,464,170
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Balut	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Balut	-	Lokasi	-	DAU Murni		-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Balut	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Balut	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
			Kab. Balut				DAU Murni				
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Balut	10	Kali	90,751,452	DAU Murni		10	Kali	104,364,170
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Balut	10	Kali	44,751,452	DAU Murni		10	Kali	51,464,170
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Balut	1	Dokumen	23,000,000	DAU Murni		1	Dokumen	26,450,000
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Balut	3	Orang	23,000,000	DAU Murni		3	Orang	26,450,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Balut	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Balut	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
			Kab. Balut				DAU Murni				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Balut	-	Unit	40,250,000	DAU Murni		-	Unit	46,287,500
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Balut	2	Kelompok	40,250,000	DAU Murni		2	Kelompok	46,287,500
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Balut	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
			Kab. Balut				DAU Murni				
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Balut	-	Unit	46,000,000	DAU Murni		-	Unit	52,900,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Balut	2	Unit	46,000,000	DAU Murni		2	Unit	52,900,000

3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Morut	100 %	161,000,000	DAU Murni	100 %	185,150,000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Morut	1 Paket	23,000,000	DAU Murni	1 Paket	26,450,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morut	1 Paket	23,000,000	DAU Murni	1 Paket	26,450,000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morut	1 Paket	115,000,000	DAU Murni	1 Paket	132,250,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morut	100 %	161,000,000	DAU Murni	100 %	185,150,000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morut	1 Paket	28,750,000	DAU Murni	1 Paket	33,062,500
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morut	1 Paket	5,750,000	DAU Murni	1 Paket	6,612,500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morut	1 Paket	126,500,000	DAU Murni	1 Paket	145,475,000
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morut	100 %	155,250,000	DAU Murni	100 %	178,537,500
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morut	1 Paket	103,500,000	DAU Murni	1 Paket	119,025,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morut	1 Paket	5,750,000	DAU Murni	1 Paket	6,612,500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morut	1 Paket	23,000,000	DAU Murni	1 Paket	26,450,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morut	1 Paket	23,000,000	DAU Murni	1 Paket	26,450,000
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Morut	27 Ha	450,250,000	DAU Murni	28 Ha	493,287,500
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Morut	1 Dokumen	370,250,000	DAU Murni	1 Dokumen	425,787,500
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Morut	- Dokumen	-	DAU Murni	- Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Morut	- Km		DAU Murni		
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morut	- Ha		DAU Murni		
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Morut	- Dokumen		DAU Murni		
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Morut	1 Dokumen	92,000,000	DAU Murni	1 Dokumen	105,800,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Morut	1 Dokumen	92,000,000	DAU Murni	1 Dokumen	105,800,000
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morut	1 Unit	115,000,000	DAU Murni	1 Unit	132,250,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morut	1 Unit	86,250,000	DAU Murni	1 Unit	99,187,500
		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morut	5 Unit	28,750,000	DAU Murni	5 Unit	33,062,500
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Morut	27 Ha	450,250,000	DAU Murni	28 Ha	493,287,500
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Morut	1 Dokumen	23,000,000	DAU Murni	1 Dokumen	26,450,000
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Morut	27 Ha	230,000,000	DAU Murni	28 Ha	240,000,000

		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morut	3	Kelompok	17,250,000	DAU Murni		3	Kelompok	19,837,500
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Morut	20,000	Batang	180,000,000	DAU Murni		20,000	Batang	207,000,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Morut	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morut	-	Lokasi	-	DAU Murni		-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morut	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morut	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
			Kab. Morut				DAU Murni				
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Morut	10	Kali	100,000,000	DAU Murni		10	Kali	115,000,000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Morut	10	Kali	100,000,000	DAU Murni		10	Kali	115,000,000
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Morut	-	Dokumen	-	DAU Murni		-	Dokumen	-
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Morut	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Morut	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Morut	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
			Kab. Morut				DAU Murni				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Morut	1	Unit	57,500,000	DAU Murni		1	Unit	66,125,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Morut	1	Kelompok	57,500,000	DAU Murni		1	Kelompok	66,125,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Morut	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
			Kab. Morut				DAU Murni				
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Morut	2	Unit	5,750,000	DAU Murni		2	Unit	6,612,500
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Morut	2	Unit	5,750,000	DAU Murni		2	Unit	6,612,500
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Morut	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Morut	-	Kali	-	DAU Murni		-	Kali	-
			Kab. Morut				DAU Murni				

3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Morut	- %	-	DAU Murni	- %	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Morut	- Lokasi	-	DAU Murni	- Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Morut	- Kali	-	DAU Murni	- Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Morut	- Kelompok	-	DAU Murni	- Kelompok	-
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Morut	100 Ha	130,000,000	DAU Murni	100 Ha	144,500,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Morut	3 Kelompok	130,000,000	DAU Murni	3 Kelompok	144,500,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Morut	- Orang	-	DAU Murni	- Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Morut	3 Kelompok	30,000,000	DAU Murni	3 Kelompok	34,500,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Morut	100 Ha	100,000,000	DAU Murni	100 Ha	110,000,000
			Kab. Morut			DAU Murni		
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Morut	1 Kegiatan	-	DAU Murni	1 Kegiatan	-
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Morut	1 Kegiatan	-	DAU Murni	1 Kegiatan	-
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Morut	- Kegiatan	-	DAU Murni	- Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Morut	1 Kegiatan	-	DAU Murni	1 Kegiatan	-
01.00	UPT KPH TEPE ASA MAROSO		Kab. Morowali		1,778,500,000	DAU Murni		1,972,025,000
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Morowali	100 %	894,500,000	DAU Murni	100 %	968,675,000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Morowali	100 %	235,750,000	DAU Murni	100 %	271,112,500
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	1 Paket	86,250,000	DAU Murni	1 Paket	99,187,500
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	1 Paket	34,500,000	DAU Murni	1 Paket	39,675,000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Morowali	1 Paket	28,750,000	DAU Murni	1 Paket	33,062,500
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	1 Paket	86,250,000	DAU Murni	1 Paket	99,187,500
			Kab. Morowali			DAU Murni		
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Morowali	100 %	300,000,000	DAU Murni	100 %	300,000,000

3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Morowali	1	Paket	-	DAU Murni	-	Paket	-
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali	-	Paket	-	DAU Murni	-	Paket	-
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	1	Paket	300,000,000	DAU Murni	1	Paket	300,000,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali	100	%	172,500,000	DAU Murni	100	%	198,375,000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali	1	Paket	28,750,000	DAU Murni	1	Paket	33,062,500
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	-	Paket	-	DAU Murni	-	Paket	-
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	1	Paket	143,750,000	DAU Murni	1	Paket	165,312,500
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morowali	100	%	186,250,000	DAU Murni	100	%	199,187,500
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	1	Paket	86,250,000	DAU Murni	1	Paket	99,187,500
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali	-	Paket	-	DAU Murni	-	Paket	-
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	1	Paket	100,000,000	DAU Murni	1	Paket	100,000,000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	-	Paket	-	DAU Murni	-	Paket	-
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Morowali	27	Ha	462,500,000	DAU Murni	28	Ha	531,125,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1	Dokumen	291,500,000	DAU Murni	1	Dokumen	327,725,000
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Morowali	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Morowali	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morowali	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Morowali	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1	Dokumen	50,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	50,000,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Morowali	1	Dokumen	50,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	50,000,000
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morowali	25	Unit	57,500,000	DAU Murni	25	Unit	66,125,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morowali	5	Unit	28,750,000	DAU Murni	5	Unit	33,062,500

		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Morowali	25	Unit	28,750,000	DAU Murni	25	Unit	33,062,500
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Morowali	27	Ha	462,500,000	DAU Murni	28	Ha	531,125,000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Morowali	-	Dokumen	75,000,000	DAU Murni	-	Dokumen	75,000,000
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Morowali	27	Ha	230,000,000	DAU Murni	28	Ha	240,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morowali	2	Kelompok	100,000,000	DAU Murni	3	Kelompok	150,000,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Morowali	20,000	Batang	57,500,000	DAU Murni	20,000	Batang	66,125,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Morowali	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morowali	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morowali	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Morowali	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Morowali	12	Kali	109,250,000	DAU Murni	12	Kali	125,637,500
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Morowali	12	Kali	46,000,000	DAU Murni	12	Kali	52,900,000
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Morowali	1	Dokumen	28,750,000	DAU Murni	1	Dokumen	33,062,500
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Morowali	15	Orang	34,500,000	DAU Murni	15	Orang	39,675,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Morowali	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Morowali	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Morowali				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Morowali	2	Unit	57,500,000	DAU Murni	2	Unit	66,125,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan Budidaya dan Unit Usaha Pengolahan HHBK	Kab. Morowali	2	Kelompok	57,500,000	DAU Murni	2	Kelompok	66,125,000

01.00	UPT KPH GUNUNG DAKO		Kab. Tolitoli			2,102,268,995	DAU Murni			2,244,609,345
3.28.01		Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Tolitoli	100	%	382,268,995	DAU Murni	100	%	439,609,345
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tolitoli	100	%	81,557,715	DAU Murni	100	%	93,791,373
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tolitoli	1	Paket	60,507,152	DAU Murni	1	Paket	69,583,225
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Tolitoli	1	Paket	21,050,563	DAU Murni	1	Paket	24,208,148
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Tolitoli	100	%	-	DAU Murni	100	%	-
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tolitoli	-	Paket	-	DAU Murni	-	Paket	-
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tolitoli	100	%	113,828,805	DAU Murni	100	%	130,903,126
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tolitoli	1	Paket	77,076,530	DAU Murni	1	Paket	88,638,009
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tolitoli	1	Paket	36,752,275	DAU Murni	1	Paket	42,265,116
			Kab. Tolitoli				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tolitoli	100	%	186,882,475	DAU Murni	100	%	214,914,846
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tolitoli	1	Paket	186,882,475	DAU Murni	1	Paket	214,914,846
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tolitoli	1	Paket	-	DAU Murni	1	Paket	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Tolitoli	12	Ha	1,030,000,000	DAU Murni	15	Ha	1,100,000,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1	Dokumen	530,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	530,000,000
			Kab. Tolitoli				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Tolitoli	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Tolitoli	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tolitoli	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Tolitoli	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1	Dokumen	30,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	30,000,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Tolitoli	1	Dokumen	-	DAU Murni	1	Dokumen	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tolitoli	1	Unit	25,000,000	DAU Murni	1	Unit	25,000,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tolitoli	1	Unit	-	DAU Murni	1	Unit	-

		Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Tolitoli	1	Unit	-	DAU Murni		1	Unit	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni				
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Tolitoli	12	Ha	1,030,000,000	DAU Murni		15	Ha	1,100,000,000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Tolitoli	1	Dokumen	-	DAU Murni		1	Dokumen	-
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Tolitoli	12	Ha	100,000,000	DAU Murni		15	Ha	110,000,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tolitoli	4	Kelompok	-	DAU Murni		4	Kelompok	-
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Tolitoli	25,000	Batang	-	DAU Murni		25,000	Batang	-
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Tolitoli	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tolitoli	-	Lokasi	-	DAU Murni		-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tolitoli	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Tolitoli	-	Kelompok	-	DAU Murni		-	Kelompok	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni				
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Tolitoli	12	Kali	300,000,000	DAU Murni		12	Kali	300,000,000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Tolitoli	12	Kali	-	DAU Murni		12	Kali	-
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Tolitoli	3	Dokumen	-	DAU Murni		3	Dokumen	-
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Tolitoli	10	Orang	-	DAU Murni		10	Orang	-
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Tolitoli	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Tolitoli	-	Orang	-	DAU Murni		-	Orang	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Tolitoli	2	Unit	150,000,000	DAU Murni		2	Unit	150,000,000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitasi Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Tolitoli	2	Kelompok	-	DAU Murni		2	Kelompok	-
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Tolitoli	-	Unit	-	DAU Murni		-	Unit	-
			Kab. Tolitoli				DAU Murni				

3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Tolitoli	8	Unit	25,000,000	DAU Murni	8	Unit	25,000,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Tolitoli	8	Unit	-	DAU Murni	8	Unit	-
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Tolitoli	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan	Kab. Tolitoli	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Kab. Tolitoli	-	%	-	DAU Murni	-	%	-
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kab. Tolitoli	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Tolitoli	-	Kali	-	DAU Murni	-	Kali	-
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Kab. Tolitoli	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Tolitoli	100	Ha	130,000,000	DAU Murni	100	Ha	145,000,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Tolitoli	3	Kelompok	130,000,000	DAU Murni	3	Kelompok	145,000,000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh	Kab. Tolitoli	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha mendukung Perhutanan Sosial	Kab. Tolitoli	3	Kelompok	30,000,000	DAU Murni	3	Kelompok	35,000,000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Kab. Tolitoli	100	Ha	100,000,000	DAU Murni	100	Ha	110,000,000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Sistem data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	Kab. Tolitoli	1	Kegiatan	30,000,000	DAU Murni	1	Kegiatan	30,000,000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan DAS di Prov. Sulteng	Kab. Tolitoli	1	Kegiatan	30,000,000	DAU Murni	1	Kegiatan	30,000,000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi dan daya dukung di wilayah DAS	Kab. Tolitoli	-	Kegiatan	-	DAU Murni	-	Kegiatan	-
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS	Kab. Tolitoli	1	Kegiatan	30,000,000	DAU Murni	1	Kegiatan	30,000,000
01.00	UPT KPH POGOGUL		Kab. Buol			1,802,092,925	DAU Murni			2,062,145,389
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD	Kab. Buol	100	%	937,470,250	DAU Murni	100	%	984,343,288
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Buol	100	%	175,231,250	DAU Murni	100	%	201,515,938

3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol	1	Paket	105,800,000	DAU Murni	1	Paket	121,670,000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Buol	1	Paket	26,450,000	DAU Murni	1	Paket	30,417,500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buol	1	Paket	9,918,750	DAU Murni	1	Paket	11,406,563
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buol	1	Paket	33,062,500	DAU Murni	1	Paket	38,021,875
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	Kab. Buol	3	%	207,500,000	DAU Murni	3	%	366,125,000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair kantor	Kab. Buol	1	Paket	23,000,000	DAU Murni	1	Paket	26,450,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buol	1	Paket	34,500,000	DAU Murni	1	Paket	39,675,000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buol	1	Paket	150,000,000	DAU Murni	1	Paket	300,000,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buol	100	%	200,676,500	DAU Murni	100	%	230,777,975
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buol	1	Paket	69,828,000	DAU Murni	1	Paket	80,302,200
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol	1	Paket	20,000,000	DAU Murni	1	Paket	23,000,000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buol	1	Paket	110,848,500	DAU Murni	1	Paket	127,475,775
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	100	%	354,062,500	DAU Murni	100	%	185,924,375
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buol	1	Paket	31,650,000	DAU Murni	1	Paket	31,650,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buol	1	Paket	210,000,000	DAU Murni	1	Paket	25,000,000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buol	1	Paket	46,287,500	DAU Murni	1	Paket	53,230,625
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buol	1	Paket	66,125,000	DAU Murni	1	Paket	76,043,750
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Buol	12	Ha	232,250,000	DAU Murni	15	Ha	265,900,000
		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Buol	-	Dokumen	493,747,675	DAU Murni	-	Dokumen	656,189,601
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Buol	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Penataan Batas Blok/Petak KPH	Kab. Buol	-	Km	-	DAU Murni	-	Km	-
		Luas Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	Kab. Buol	-	Ha	-	DAU Murni	-	Ha	-
		Dokumen Rancangan Tata Hutan	Kab. Buol	-	Dokumen	-	DAU Murni	-	Dokumen	-
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	Kab. Buol	-	Dokumen	50,000,000	DAU Murni	-	Dokumen	57,500,000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Buol	1	Dokumen	50,000,000	DAU Murni	1	Dokumen	57,500,000
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Fasilitas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Buol	-	Unit	57,500,000	DAU Murni	25	Unit	66,125,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Buol	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
		Fasilitas Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH	Kab. Buol	2	Unit	57,500,000	DAU Murni	2	Unit	66,125,000
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan Hutan Negara	Kab. Buol	12	Ha	232,250,000	DAU Murni	15	Ha	265,900,000

3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Dokumen RTn-RHL	Kab. Buol	1	Dokumen	19,837,500	DAU Murni	1	Dokumen	22,813,125
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi	Kab. Buol	12	Ha	79,350,000	DAU Murni	15	Ha	90,065,000
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Buol	3	Kelompok	33,062,500	DAU Murni	2	Kelompok	38,021,875
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	Kab. Buol	22,000	Batang	100,000,000	DAU Murni	22,000	Batang	115,000,000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Buol	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Buol	-	Lokasi	-	DAU Murni	-	Lokasi	-
		Masyarakat Peduli Api dalam rangka Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Buol	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok yang difasilitasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Buol	-	Kelompok	-	DAU Murni	-	Kelompok	-
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Buol	-	Kali	125,637,500	DAU Murni	-	Kali	144,483,125
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.	Kab. Buol	11	Kali	99,187,500	DAU Murni	11	Kali	114,065,625
		Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	Kab. Buol	1	Dokumen	26,450,000	DAU Murni	1	Dokumen	30,417,500
		Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Buol		Orang		DAU Murni		Orang	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan	Kab. Buol	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan	Kab. Buol	-	Orang	-	DAU Murni	-	Orang	-
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kab. Buol	-	Unit	230,305,088	DAU Murni	-	Unit	334,850,851
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Fasilitas Pengembangan budidaya dan /atau unit usaha pengolahan HHBK	Kab. Buol	10	Ha	200,000,000	DAU Murni	15	Ha	300,000,000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Buol	11	Unit	30,305,088	DAU Murni	11	Unit	34,850,851
			Kab. Buol				DAU Murni			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Buol	-	Unit	30,305,088	DAU Murni	-	Unit	53,230,625
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Kab. Buol	7	Unit	30,305,088	DAU Murni	7	Unit	53,230,625
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan tanaman hutan di wilayah Prov. Sulteng	Kab. Buol	-	Unit	-	DAU Murni	-	Unit	-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan semua pihak (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru, maka kebijakan dalam merumuskan program dan kegiatan harus mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Sejak Tahun 2017, telah terbentuk 14 (empat belas) UPT lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu UPTD Tahura, UPT KPH Dampelas, UPT KPH Dolago Tanggunung, UPT KPH Toili Baturube, UPT KPH Banawa Lalundu, UPT KPH Kulawi, UPT KPH Sintuwu Maroso, UPT KPH Sivia Patuju, UPT KPH Gunung Dako, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Tepo Asa Aroa, UPT KPH Tepe Asa Moroso, UPT KPH Balantak, UPT KPH Peling, oleh karena itu dalam renja tahun 2022 telah diusulkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tahura dan KPH dimaksud.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kehutanan ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya komitmen dari semua pihak di jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta UPT-nya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien berkeadilan dan akuntabel.

Palu, 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. H. NAHARDI, MM., IPU.

Pembina Utama Madya

NIP. 19621231 198703 1 403

